



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA



2026

RENCANA AKSI KINERJA

Direktorat Jenderal
Perumahan Perkotaan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Dokumen Rencana Aksi Kinerja (Renaksi) Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2026 dapat diselesaikan dengan baik. Rencana Aksi Kinerja ini disusun sebagai salah satu wujud penyelenggaraan perumahan yang akuntabel dan transparan. Dokumen ini disusun sebagai bentuk penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.

Rencana Aksi Kinerja merupakan acuan pelaksanaan program dan kegiatan prioritas di bidang perumahan dan kawasan perkotaan, yang berfokus pada pencapaian target pembangunan berkelanjutan, serta penyediaan hunian layak dan terjangkau di wilayah perkotaan khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Penyusunan Rencana Aksi Kinerja mengacu pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, dan transparan, serta mendukung agenda nasional seperti Reformasi Birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan program prioritas nasional lainnya.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan dokumen ini, baik dari internal Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan maupun pemangku kepentingan terkait lainnya. Kami berharap dokumen ini dapat menjadi pedoman pelaksanaan yang efektif, serta mendorong sinergi antarunit dan mitra kerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di perkotaan yang layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan.

Akhir kata, semoga dokumen Rencana Aksi Kinerja ini dapat memberikan manfaat dan menjadi landasan yang kuat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan secara optimal.

Jakarta, 31 Maret 2026

DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN



SRI HARYATI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
DAFTAR GAMBAR	III
DAFTAR TABEL	IV
BAB I PENDAHULUAN.....	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	3
1.2.1 Tugas.....	3
1.2.2 Fungsi.....	3
1.2.3 Struktur Organisasi.....	4
1.3 Aspek Strategis (Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan)	9
1.3.1 Tujuan.....	9
1.3.2 Asta Cita Sektor Perumahan	9
1.3.3 Sasaran Program dan Kegiatan	11
1.4 Isu Strategis	12
BAB II PENETAPAN KINERJA	18
2.1 Target Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Tahun 2025 – 2029 ...	18
2.2 Target <i>Output</i> Kegiatan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Tahun 2026	29
2.3 Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Tahun 2026	30
2.4 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2026	40
2.5 Target Kinerja Triwulan	41
2.5.1 Target Kinerja Triwulan berdasarkan Perjanjian Kinerja	41
2.5.2 Target Kinerja Triwulan Berdasarkan Klasifikasi Rincian <i>Output</i> / Rincian <i>Output</i> (KRO/RO)	43
2.6 Kegiatan Tematik di Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	44
2.6.1 Program Gentengisasi	44
2.6.2 Rencana Pembangunan Rusun Subsidi Meikarta Cikarang	45
2.6.3 Penataan Kawasan Kumuh menjadi Kampung Gotong Royong Menteng Tengkulun	46
2.6.4 Rumah Susun Sewa Senen, Jakarta Pusat	47
2.6.5 Rencana Pembangunan Rusun Subsidi di Lahan Komdigi	48
BAB III PENUTUP	52
LAMPIRAN	55
LAMPIRAN I. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN	55
LAMPIRAN II. SURAT PENGESAHAN DIPA	68
LAMPIRAN III. LEMBAR PERJANJIAN KINERJA	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Bagan Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan.....	4
Gambar 1. 2 Asta Cita dan Visi Misi RPJMN 2025 – 2029.....	10
Gambar 1. 3 Peta Jalan Pembangunan dan Renovasi 3 Juta Rumah	11
Gambar 1. 4 Peta Sebaran <i>Backlog</i> Kelayakan berdasarkan Provinsi	13
Gambar 1. 5 Peta Sebaran <i>Backlog</i> Kepemilikan berdasarkan Provinsi.....	13
Gambar 2. 1 Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Tahun 2026.....	31
Gambar 2. 2 Rencana Lokasi Pembangunan Rusun Subsidi Meikarta Cikarang	46
Gambar 2. 3 Rencana Lokasi Pembangunan Rusunawa Senen	48
Gambar 2. 4 Klasifikasi Area Lahan Terbangun / Non Terbangun Rusun Lahan Komdigi	49
Gambar 2. 5 Dokumentasi Foto Udara Rusun Subsidi Lahan Komdigi.....	49

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian PKP 2025-2029	18
Tabel 2. 2	Sasaran Program dan Indikator Kinerja Sasaran Program Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan 2025 – 2029	19
Tabel 2. 3	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan 2025 – 2029	21
Tabel 2. 4	Tabel Target <i>Output</i> Kegiatan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Tahun 2026	29
Tabel 2. 5	Metode Perhitungan Capaian Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	33
Tabel 2. 6	DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Tahun 2026	40
Tabel 2. 7	Target Rencana Aksi Kinerja di Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan TA 2026	42
Tabel 2. 8	Target Kinerja Triwulan Berdasarkan KRO/RO	44



BAB 1

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1) bahwa: setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan; mengamanatkan bahwa setiap Warga Negara Indonesia memiliki hak dasar atas perumahan dan permukiman. Hal tersebut juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 40 bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak. Pemenuhan hak dasar Warga Negara Indonesia atas tempat tinggal yang layak diwujudkan melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman merupakan kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu. Salah satu tujuan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang tercantum dalam UU No. 1 Tahun 2011 adalah mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk secara merata melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan permukiman sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Sejalan dengan amanat undang-undang di atas, salah satu arah kebijakan sarana dan prasarana untuk mendukung transformasi ekonomi yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025 – 2045 yaitu pengembangan sektor perumahan yang mendukung kegiatan dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan rasio pembiayaan perumahan terhadap PDB dan mendorong pertumbuhan perekonomian. Selain itu, RPJPN juga memberikan arahan bahwa penyediaan perumahan diarahkan untuk memastikan seluruh rumah tangga menempati rumah yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan.

Sebagai bentuk turunan dari RPJPN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 – 2029 juga memuat arahan mengenai penyediaan hunian berkualitas. Arahan tersebut termuat dalam Program Prioritas No. 13 yaitu “Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk

masyarakat perdesaan/ perkotaan dan rakyat yang membutuhkan”, serta tercantum dalam Program Hasil Terbaik Cepat No. 7 yaitu “Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Desa dan Kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Menjamin Penyediaan Rumah Murah Bersanitasi Baik untuk Membutuhkan, Terutama Generasi Milenial, Generasi Z, dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)”. Di samping itu, Proyek Strategis Nasional No. 75 dalam RPJMN juga memuat proyek Pembangunan 3 Juta Rumah Nasional dengan koordinator Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Sejalan dengan rencana pembangunan nasional di atas, arah kebijakan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman antara lain:

- a. Penguatan layanan peningkatan akses perumahan yang layak dan terjangkau;
- b. Penguatan layanan penanganan kumuh yang terpadu secara kolaboratif;
- c. Penguatan layanan tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan yang akuntabel dan berintegritas;
- d. Penguatan kualitas tata kelola dan pengawasan.

1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman melaksanakan tugas dan fungsi organisasi sesuai yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

1.2.1 Tugas

Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman melaksanakan tugas dan fungsi organisasi sesuai yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

1.2.2 Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan menyelenggarakan fungsi antara lain:

- a. Perumusan kebijakan di bidang perumahan perkotaan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan perkotaan;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perumahan perkotaan;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perumahan perkotaan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan perkotaan;

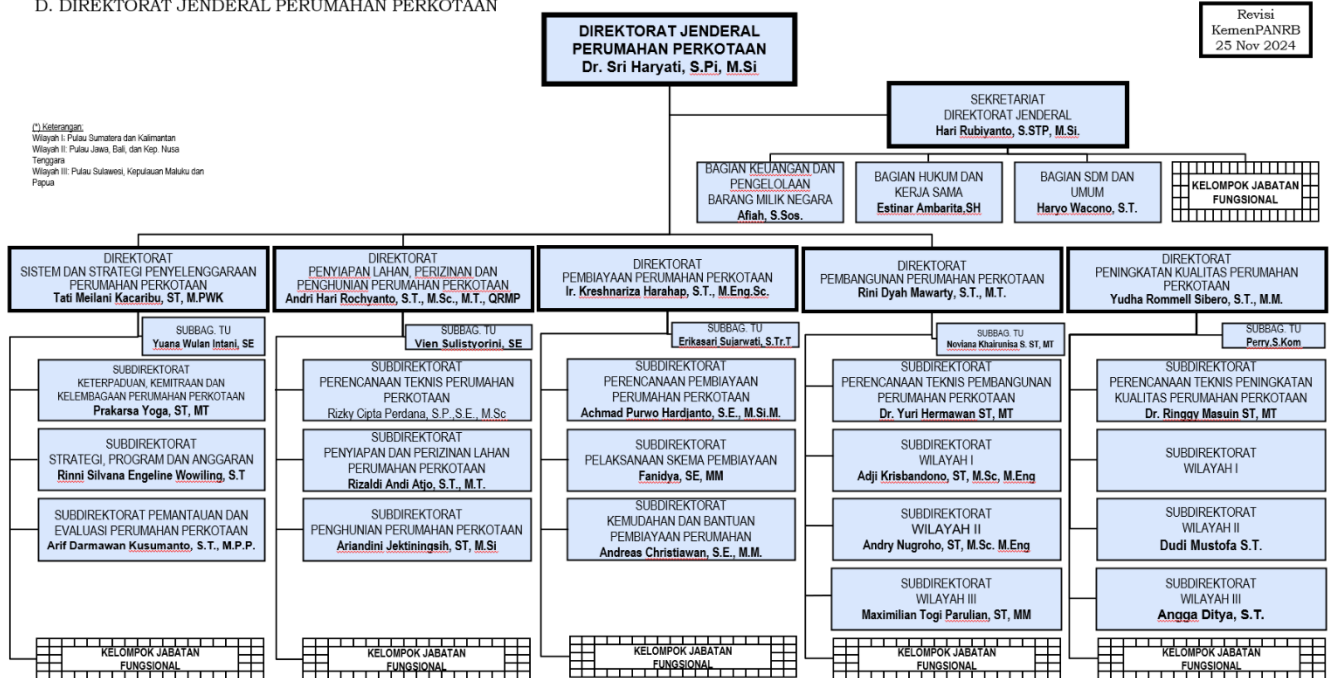
- f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

1.2.3 Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan sesuai yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan
- b. Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perkotaan
- c. Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan
- d. Direktorat Pembiayaan Perumahan Perkotaan
- e. Direktorat Pembangunan Perumahan Perkotaan
- f. Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan

D. DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN



Gambar 1. 1 Bagan Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

Sumber: Peraturan Menteri PKP No. 1 Tahun 2024

Susunan struktur organisasi Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di atas dapat dijelaskan sesuai tugas dan fungsi, sebagai berikut:

a. Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan direktorat jenderal. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam penyusunan laporan akuntansi dan laporan barang milik negara;
- 2) Pelaksanaan administrasi perbendaharaan dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak;
- 3) Pengelolaan barang milik negara di lingkungan direktorat jenderal;
- 4) Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum serta penyelenggaraan komunikasi publik direktorat jenderal;
- 5) Pelaksanaan pembinaan urusan sumber daya manusia, organisasi dan tata laksana, serta reformasi birokrasi;
- 6) Pelaksanaan penyusunan laporan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan direktorat jenderal; dan
- 7) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat jenderal.

b. Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perkotaan

Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan dan pengembangan strategi, penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan kemitraan dan kelembagaan, pengelolaan data dan sistem informasi, serta pemantauan dan evaluasi kinerja di bidang pembangunan perumahan perkotaan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan strategi pembangunan perumahan perkotaan jangka panjang dan jangka menengah;
- 2) Penyusunan rencana dan pengembangan strategi, serta rencana strategis pembangunan perumahan perkotaan;
- 3) Pelaksanaan dan pengendalian program dan anggaran tahunan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber pembiayaan lainnya di bidang pembangunan perumahan perkotaan;
- 4) Pelaksanaan kemitraan dan pembinaan kelembagaan di bidang pembangunan perumahan perkotaan;

- 5) Pelaksanaan kerja sama dan pinjaman dan hibah luar negeri bidang pembangunan perumahan perkotaan;
- 6) Pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi di bidang pembangunan perumahan perkotaan;
- 7) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan perumahan perkotaan; dan
- 8) Pelaksanaan urusan tata direktorat.

c. Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan

Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, penyusunan kebijakan, standar, prosedur, dan kriteria, penyusunan rencana penyiapan lahan, koordinasi perizinan, koordinasi pelaksanaan pemanfaatan dan penghunian di bidang pembangunan perumahan perkotaan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan program, anggaran, dan rencana teknis koordinasi penyiapan lahan, perizinan, dan penghunian di bidang pembangunan perumahan perkotaan;
- 2) Pelaksanaan pembinaan dan penyusunan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria koordinasi penyiapan lahan, perizinan, dan penghunian di bidang pembangunan perumahan perkotaan;
- 3) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi penyiapan lahan di bidang pembangunan perumahan perkotaan;
- 4) Pelaksanaan koordinasi penyiapan lahan di bidang pembangunan perumahan perkotaan;
- 5) Pelaksanaan koordinasi penyiapan perizinan di bidang pembangunan perumahan perkotaan;
- 6) Pelaksanaan koordinasi, pendampingan dan validasi data penghunian di bidang pembangunan perumahan perkotaan; dan
- 7) Pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

d. Direktorat Pembiayaan Perumahan Perkotaan

Direktorat Pembiayaan Perumahan Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan penyaluran kemudahan dan bantuan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan dan supervisi,

pelaksanaan kemitraan dan pembiayaan kreatif serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembiayaan perumahan perkotaan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Direktorat Pembiayaan Perumahan Perkotaan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan program dan anggaran di bidang pembiayaan perumahan perkotaan;
- 2) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembiayaan perumahan perkotaan;
- 3) Pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan perumahan perdesaan serta penyaluran kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan perkotaan;
- 4) Koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan pembiayaan perumahan perkotaan;
- 5) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembiayaan perumahan perkotaan;
- 6) Penyiapan penetapan sumber pendanaan dan skema pembiayaan perumahan perkotaan;
- 7) Pelaksanaan pelayanan publik di bidang pembiayaan perumahan perkotaan;
- 8) Pelaksanaan kemitraan, kerja sama pemerintah dengan badan usaha, investasi dan pembiayaan kreatif di perkotaan;
- 9) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembiayaan perumahan perkotaan;
- 10) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembiayaan perumahan perkotaan; dan
- 11) Pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

e. Direktorat Pembangunan Perumahan Perkotaan

Direktorat Pembangunan Perumahan Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan strategi penyelenggaraan pembangunan, penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pembangunan, pengelolaan data dan informasi, serta pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan rumah susun, rumah khusus serta prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang pembangunan perumahan perkotaan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Direktorat Pembangunan Perumahan Perkotaan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan dan strategi penyelenggaraan rumah susun, rumah khusus serta prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang pembangunan perumahan perkotaan;

- 2) Penyiapan penyusunan program dan anggaran penyelenggaraan rumah susun, rumah khusus serta prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang pembangunan perumahan perkotaan;
- 3) Pelaksanaan kebijakan pembangunan rumah susun, rumah khusus serta prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang pembangunan perumahan perkotaan;
- 4) Penyiapan perencanaan teknis penyelenggaraan rumah susun, rumah khusus serta prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang pembangunan perumahan perkotaan;
- 5) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan rumah susun, rumah khusus serta prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang pembangunan perumahan perkotaan;
- 6) Pelaksanaan pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi penyelenggaraan rumah susun, rumah khusus serta prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang pembangunan perumahan perkotaan;
- 7) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan rumah susun, rumah khusus serta prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang pembangunan perumahan perkotaan;
- 8) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan rumah susun, rumah khusus serta prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang pembangunan perumahan perkotaan; dan
- 9) Pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

f. Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan

Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program anggaran, penyusunan rencana teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria, fasilitasi pendataan dan verifikasi, fasilitasi pemberdayaan dan kemitraan, pelaksanaan bantuan stimulan, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan kualitas pembangunan perumahan perkotaan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyiapan penyusunan program anggaran, penyusunan rencana teknis, penyusunan standar pedoman di bidang peningkatan kualitas pembangunan perumahan perkotaan;
- 2) Fasilitasi pendataan dan verifikasi rumah tidak layak huni di bidang peningkatan kualitas pembangunan perumahan perkotaan;

- 3) Fasilitasi pemberdayaan masyarakat, fasilitasi akses kemitraan, dan layanan jasa bidang di bidang peningkatan kualitas pembangunan perumahan perkotaan;
- 4) Penyiapan penerima bantuan dan pendampingan dalam pelaksanaan bantuan stimulan di bidang peningkatan kualitas pembangunan perumahan perkotaan;
- 5) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan pemanfaatan bantuan di bidang peningkatan kualitas pembangunan perumahan perkotaan; dan
- 6) Pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

1.3 Aspek Strategis (Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan)

1.3.1 Tujuan

Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan pada tahun 2025 – 2029 bertujuan untuk meningkatkan rumah tangga dengan akses hunian layak dan terjangkau di perkotaan. Upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut antara lain:

- a. Pembangunan hunian baru layak huni di perkotaan, baik vertikal maupun tapak;
- b. Peningkatan kualitas rumah MBR yang tidak memenuhi syarat kelaikan rumah;
- c. Peningkatan akses rumah tangga terhadap fasilitas pembiayaan perumahan atau bantuan subsidi/kemudahan perumahan;
- d. Penanganan permukiman kumuh secara terpadu di perkotaan.

1.3.2 Asta Cita Sektor Perumahan

Asta Cita sektor perumahan adalah implementasi dari delapan tujuan pemerintahan yang berfokus pada penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hal ini diwujudkan melalui program nasional seperti "Program 3 Juta Rumah", yang didukung oleh berbagai kementerian, lembaga, dan sektor swasta seperti Bank BTN, Bank BRI, dan Badan Bank Tanah. Program ini juga mencakup pembangunan infrastruktur pendukung dan mendorong pergerakan ekonomi melalui sektor konstruksi, bahan bangunan, dan tenaga kerja. Tiga Pilar Utama Asta Cita Sektor Perumahan antara lain:

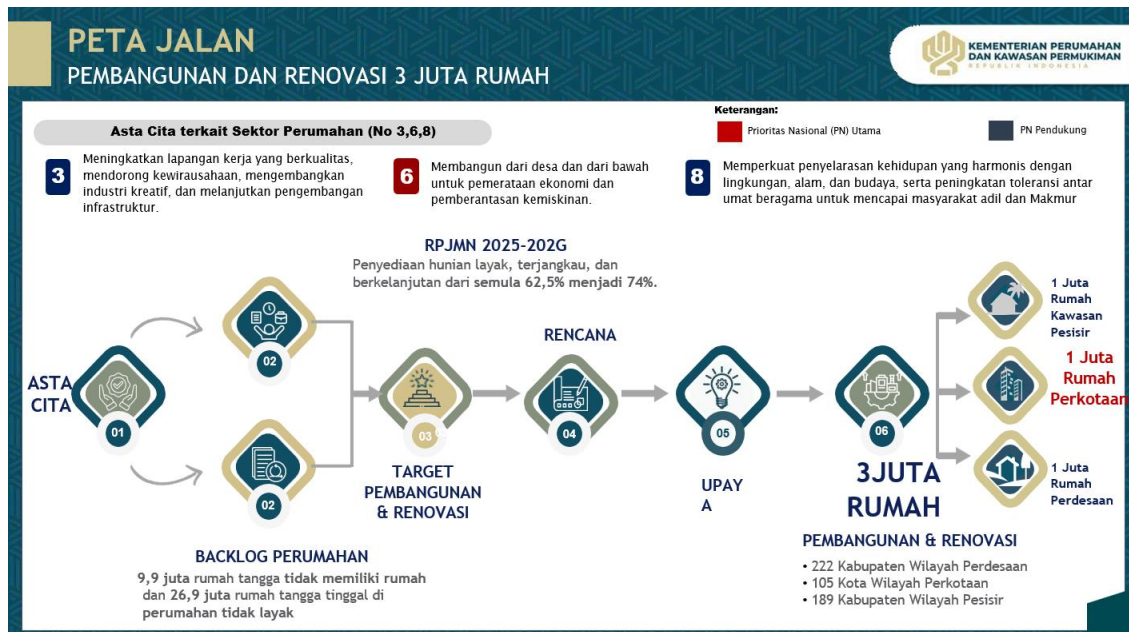
- a. Penyediaan hunian yang layak dan terjangkau: Pemerintah melalui program nasional seperti "Program 3 Juta Rumah" menargetkan penyediaan hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi masyarakat, khususnya MBR.
- b. Pengembangan infrastruktur pendukung: Pembangunan rumah juga diiringi dengan penyediaan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan air bersih, yang dilakukan secara terintegrasi dengan pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat.

- c. Penggerak ekonomi nasional: Sektor perumahan dipandang sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang dapat menggerakkan sektor konstruksi, bahan bangunan, tenaga kerja, dan investasi swasta, sehingga memberikan dampak ekonomi yang luas.



Gambar 1. 2
Asta Cita dan Visi Misi RPJMN 2025 – 2029

Sumber: RPJMN Tahun 2025 – 2029



Gambar 1. 3
Peta Jalan Pembangunan dan Renovasi 3 Juta Rumah
Sumber: Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, Kementerian PKP

1.3.3 Sasaran Program dan Kegiatan

Pencapaian tujuan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan didukung melalui dua program yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, yaitu:

a. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman

Program Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki sasaran berupa “Meningkatnya Hunian Layak dan Terjangkau di Wilayah Perkotaan”. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 – 2029, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan mendapatkan amanat yang dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun mendatang berupa:

- 1) Menyediakan 879.987 unit rumah melalui Pembangunan 14.710 unit rumah susun, 36.840 unit rumah khusus regular, 337.912 unit rumah tidak layak huni yang ditangani secara swadaya, dan 489.529 unit rumah melalui fasilitasi pembiayaan perumahan;
- 2) Menyediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang melayani 32.582 unit rumah, dengan rincian 22.832 unit rumah tapak dan 9.750 unit hunian vertikal; serta
- 3) Menangani 268 hektar permukiman kumuh di perkotaan secara terpadu.

Pelaksanaan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman oleh Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan diukur menggunakan tiga indikator, yaitu:

- 1) Persentase Hunian Layak dan Terjangkau di Wilayah Perkotaan;
- 2) Persentase Peningkatan Penanganan Permukiman Kumuh di Wilayah Perkotaan;

- 3) Persentase Desa yang Memiliki 100% Rumah Layak Huni di Wilayah Perkotaan.

b. Program Dukungan Manajemen

Program Dukungan Manajemen bertujuan untuk memastikan tugas dan fungsi organisasi dapat berjalan secara optimal, serta meningkatkan kualitas tata kelola organisasi. Program ini memiliki sasaran “Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan”. Untuk mengetahui Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, terdapat 10 indikator yang diukur, antara lain:

- 1) Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan;
- 2) Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN;
- 3) Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum;
- 4) Tingkat Layanan Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian Organisasi Tata Laksana;
- 5) Nilai Kinerja Anggaran;
- 6) Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI;
- 7) Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Organisasi;
- 8) Tingkat Layanan Komunikasi Publik;
- 9) Tingkat Layanan Manajemen Data Unit Organisasi;
- 10) Tingkat Kualitas Laporan Penyelenggaraan SPIP.

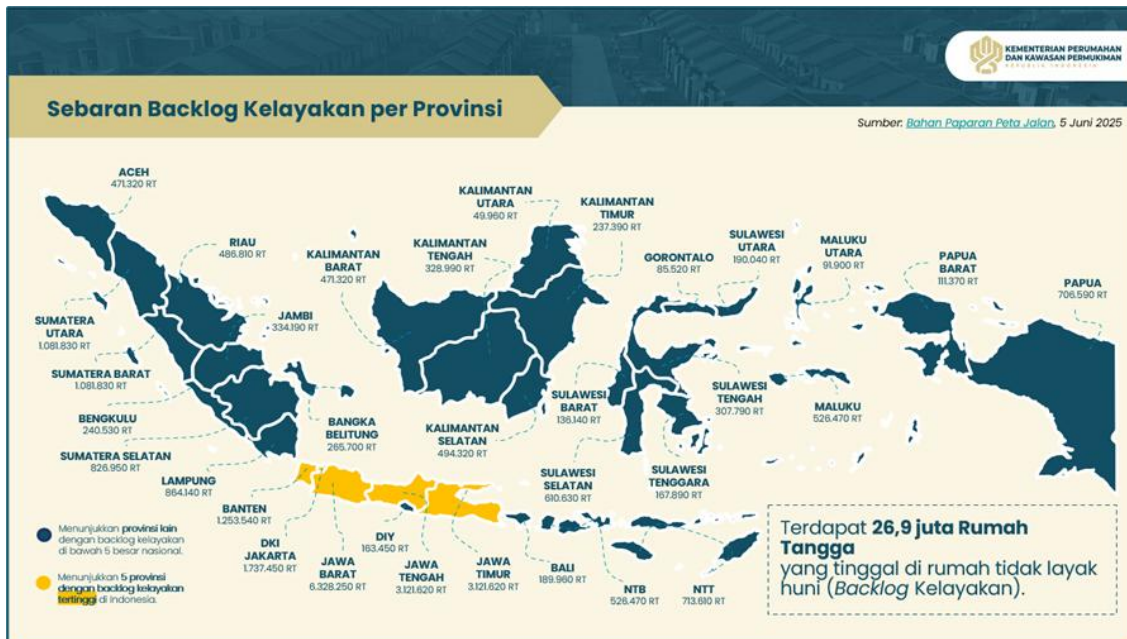
1.4 Isu Strategis

Isu strategis merupakan hasil rumusan yang didasarkan pada identifikasi masalah terkait perumahan perkotaan, terutama kondisi atau permasalahan yang memiliki dampak signifikan apabila tidak segera ditangani. Di sisi lain, isu strategis juga dapat memuat potensi dalam penyelenggaraan perumahan perkotaan yang tidak akan mencapai titik optimal apabila tidak segera dikembangkan. Isu strategis menjadi hal penting yang harus diperhatikan dalam penyusunan rencana karena menjadi salah satu acuan dalam penyusunan program untuk mencapai tujuan. Isu Strategis Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan antara lain:

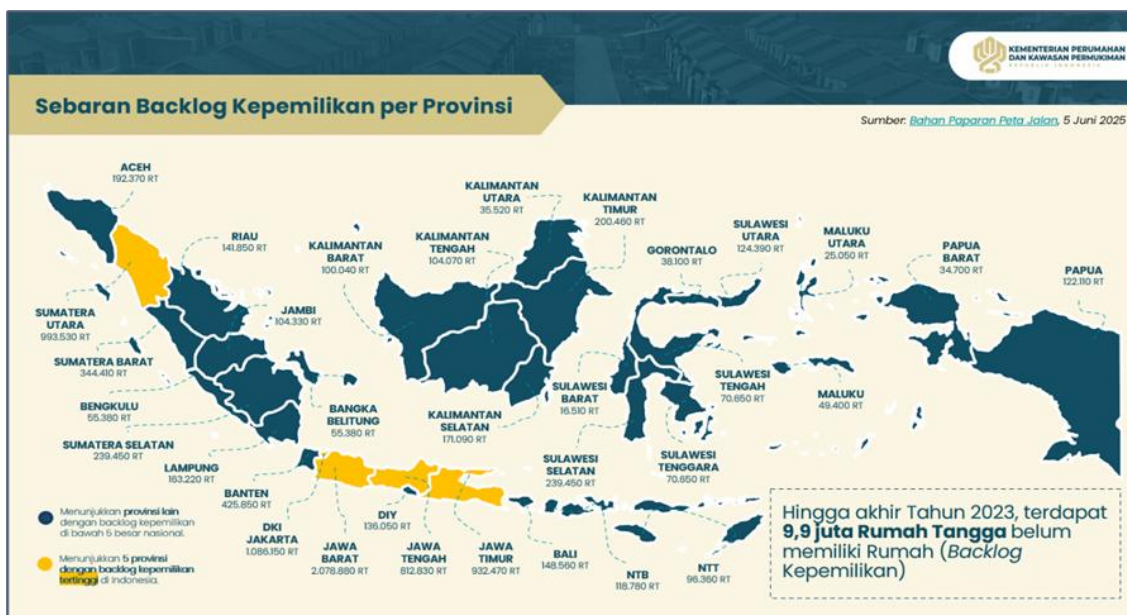
a. Backlog Perumahan di Wilayah Perkotaan

Kondisi backlog perumahan di Indonesia saat ini terbagi menjadi dua dimensi backlog yang cukup krusial, yaitu backlog kepemilikan dan backlog kualitas atau kelayakan. Backlog kepemilikan menunjukkan rumah tangga yang belum memiliki rumah sendiri, sementara backlog kualitas menunjukkan rumah tangga yang tinggal di hunian yang tidak memenuhi standar kelayakan. Berdasarkan data dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan

Permukiman (PKP) tahun 2024, tercatat sebanyak 9,9 juta rumah tangga di Indonesia tidak memiliki rumah dan 26,9 juta rumah tangga lainnya tinggal di rumah tidak layak huni. Tingginya backlog kepemilikan menandakan masih banyak keluarga yang belum memiliki rumah sendiri dan bertempat tinggal dengan cara menumpang, mengontrak rumah, atau menempati hunian tanpa status hukum yang sah. Sementara itu, backlog kualitas atau backlog kelayakan menunjukkan rumah tangga dengan tempat tinggal yang tidak layak secara standar teknis, kesehatan, maupun lingkungan hidupnya.



Gambar 1. 4
Peta Sebaran Backlog Kelayakan berdasarkan Provinsi
Sumber: Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, Kementerian PKP



Gambar 1. 5
Peta Sebaran Backlog Kepemilikan berdasarkan Provinsi
Sumber: Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, Kementerian PKP

b. Keterbatasan Lahan dan Tingginya Harga Tanah

Pertambahan jumlah penduduk di perkotaan yang tidak diimbangi dengan penyediaan hunian yang memadai akan mendorong peningkatan permintaan lahan, terutama di kota-kota besar. Di sisi lain, ketersediaan lahan terus mengalami penurunan akibat terjadinya alih fungsi lahan, pertumbuhan populasi dan peningkatan kepadatan penduduk, serta fragmentasi ruang kota. Keterbatasan lahan yang ada di pusat kota menyebabkan terjadinya lonjakan harga tanah. Kenaikan harga tanah terutama di wilayah perkotaan membuat tanah menjadi komoditas yang semakin tidak terjangkau bagi MBR. Selain itu, masalah terkait ketersediaan lahan untuk pembangunan perumahan juga disebabkan oleh faktor belum optimalnya pendataan dan pemetaan ketersediaan lahan kosong secara mutakhir dan menyeluruh di seluruh wilayah perkotaan di Indonesia. Di sisi lain, terdapat instansi pusat maupun daerah yang memiliki aset lahan namun belum dimanfaatkan secara optimal karena proses identifikasi, pengalihan fungsi, serta pengelolaan lahannya masih terkendala oleh belum optimalnya koordinasi lintas sektoral, legalitas aset, serta belum optimalnya perencanaan secara terpadu.

c. Skema Pembiayaan yang Inklusif dan Berkelanjutan

Dalam mempercepat pemenuhan penyediaan hunian layak dan terjangkau, terdapat potensi untuk mengembangkan potensi pembiayaan penyelenggaraan perumahan yang lebih inklusif untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Beberapa skema pembiayaan yang dikembangkan antara lain:

- 1) Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) merupakan program pembiayaan perumahan berbasis tabungan jangka panjang dengan skema gotong royong yang dapat digunakan dengan bunga terjangkau;
- 2) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) merupakan program Kredit Perumahan Rakyat (KPR) bersubsidi yang membantu MBR untuk memiliki rumah layak dengan bunga tetap dan jangka waktu lama, yaitu 20 tahun;
- 3) Giro Wajib Minimum (GWM) merupakan insentif likuiditas perbankan melalui relaksasi giro wajib minimum bertujuan untuk mendorong peningkatan penyaluran kredit perumahan oleh bank;
- 4) Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan merupakan kredit bersubsidi untuk penyediaan perumahan bagi pelaku usaha (UMKM, pengembang, kontraktor, toko bangunan) dengan bunga rendah.

Meski demikian, pelaksanaan skema pembiayaan tersebut belum dapat dilaksanakan secara optimal. Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan pekerja

sektor informal memiliki keterbatasan akses pembiayaan perumahan terutama terkait dengan persyaratan administrasi, rendahnya inklusi keuangan, serta penganekaragaman skema pembiayaan yang belum optimal. Belum optimalnya pelaksanaan skema pembiayaan perumahan untuk MBR dan pekerja sektor informal ditunjukkan dengan fokus pembiayaan yang masih terbatas pada skema kepemilikan (KPR FLPP), ketergantungan pendanaan pada APBN dengan jangka waktu dan fleksibilitas terbatas, diversifikasi sumber pembiayaan alternatif dari sektor swasta dan nonperbankan belum optimal, keterbatasan sistem pendataan dan verifikasi yang menyebabkan ketidaktepatan sasaran penerima manfaat, serta tata kelola dan regulasi belum adaptif dan responsif terhadap kebutuhan MBR dan pekerja sektor informal.

d. Kualitas Hunian dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan data BPS tahun 2024, persentase rumah tangga perkotaan yang tinggal di hunian layak adalah 66,26%. Terbatasnya proporsi rumah tangga yang menghuni rumah layak tersebut masih menunjukkan rendahnya kualitas hunian di kawasan perkotaan. Persentase tersebut juga mengindikasikan bahwa masih terdapat kurang lebih satu dari tiga rumah tangga yang masih menghuni rumah tidak layak dengan kondisi struktur bangunan tidak ideal, keterbatasan akses sanitasi dan air bersih, serta berada di kawasan kumuh berkepadatan tinggi.

Permukiman kumuh di wilayah perkotaan umumnya tumbuh secara informal tanpa mempertimbangkan aturan terkait tata ruang, misalnya di kawasan sempadan sungai dan kawasan di tengah kota dengan peruntukan yang seharusnya bukan untuk permukiman. Kondisi kawasan permukiman kumuh yang umumnya padat akan diperburuk dengan tidak tersediannya infrastruktur dasar yang memadai, seperti air bersih, sanitasi, dan saluran drainase. Di sisi lain, keterbatasan daya beli masyarakat menengah ke bawah dan ketimpangan akses terhadap hunian layak memperparah kondisi tersebut.

e. Pengembangan Kemitraan Lintas Sektor dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan

Penyelenggaraan perumahan perkotaan dilaksanakan melalui kolaborasi lintas sektoral, antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, sektor swasta, lembaga keuangan, serta masyarakat. Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan membangun kolaborasi kelembagaan yang baik dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah, yaitu Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) untuk menjalankan program penyediaan perumahan di seluruh delineasi perkotaan di Indonesia. Di sisi lain, kemitraan dan kolaborasi antar instansi pemerintah dilakukan

untuk menyelaraskan data sektoral terkait perumahan dan penyiapan lahan, terutama integrasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), bersama Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), serta instansi terkait lainnya. Kolaborasi dan kemitraan juga disinergikan melalui program pemerintah pusat dan daerah melalui kontribusi dan tanggung jawab sosial-lingkungan (*Corporate Social Responsibility / CSR*) BUMN untuk mendukung peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman, serta terdapat keterlibatan sektor swasta dalam penyediaan perumahan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan usaha (KPBU).

Meski demikian, kolaborasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, sektor swasta, lembaga keuangan, dan mitra internasional belum berjalan secara optimal. Dalam penyelenggaraan perumahan saat ini belum terdapat standar baku kemitraan atau standar pola kerja sama dengan mekanisme berkelanjutan sehingga dapat menghambat optimalisasi pendanaan di luar APBN. Di sisi lain, belum optimalnya pendanaan yang bersumber dari dana non-APBN diakibatkan oleh minimnya minat investor di sektor perumahan. Dinamika ekonomi global dan ketidakpastian kebijakan menyebabkan investor lebih berhati-hati dalam menyalurkan pendanaannya skema pinjaman luar negeri, terutama kepada MBR yang dianggap memiliki risiko tinggi namun margin keuntungannya rendah.



BAB 2

PENETAPAN KINERJA

BAB II

PENETAPAN KINERJA

2.1 Target Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Tahun 2025 – 2029

Upaya perwujudan arah kebijakan nasional dalam hal meningkatkan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan tentunya erat kaitannya dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang memiliki tugas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan suburban pemerintahan kawasan permukiman. Pelaksanaan program perumahan dan Kawasan permukiman secara teknis dilaksanakan oleh 3 unit organisasi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, yaitu Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, Direktorat Jenderal Perumahan Pedesaan, dan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman. Dalam melaksanakan program tersebut, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan memiliki kegiatan Penyediaan Akses Perumahan yang Layak Huni di wilayah perkotaan. Sasaran strategis Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan (DJP Perkotaan) merupakan bagian dari Perencanaan Strategis (Renstra) yang merujuk pada tujuan yang ingin dicapai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang kemudian dikembangkan menjadi Sasaran Strategis 1 (satu) dan 2 (dua). Sasaran Strategis 1 yaitu meningkatnya penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efisien, layak, terjangkau, dan berkelanjutan serta Sasaran Strategis 2 yaitu meningkatnya kualitas tata kelola dan pengawasan intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Perihal besaran target indikator kinerja sasaran strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian PKP 2025-2029

Tujuan / Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman							
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman							
Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak dan Terjangkau yang difasilitasi	%	100	100	100	100	100
	Persentase luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	%	100	100	100	100	100

Tujuan / Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
	Persentase desa yang memiliki 100% rumah layak huni	%	100	100	100	100	100
Dukungan Manajemen							
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian PKP	Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PKP	%	84,90	86,70	88,50	90,30	91,80

Sumber: Penjenjangan Kinerja Renstra Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan 2025-2029

Sebagai tindak lanjut dari penyesuaian program (*redesign*), Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan melaksanakan dua program utama, yaitu:

- a. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efisien, layak, terjangkau, dan berkelanjutan. Sasaran Program Perumahan dan Kawasan Permukiman (SP-5), yaitu: meningkatnya hunian layak dan terjangkau di wilayah perkotaan. Indikator Kinerja Program (IKP) untuk Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan diperhitungkan berdasarkan:
 - 1) Persentase hunian layak dan terjangkau di wilayah perkotaan, dengan target pembangunan dan renovasi 1 juta rumah di 105 kota wilayah perkotaan;
 - 2) Persentase peningkatan penanganan permukiman kumuh di wilayah perkotaan;
 - 3) Persentase desa yang memiliki 100% rumah layak huni di wilayah perkotaan.
- b. Program Dukungan Manajemen, yang mencakup semua unit kerja di Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan. Sasaran Program Dukungan Manajemen (SP - 5), yaitu: Meningkatnya kualitas dukungan manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan. Indikator Kinerja Program (IKP) disusun berdasarkan perhitungan tingkat kualitas dukungan manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan.

Tabel 2. 2
Sasaran Program dan Indikator Kinerja Sasaran Program Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan 2025 – 2029

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / IKS / IKP	SATUAN	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
UNOR	DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN						
PROGRAM	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
SS	Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan						
SP	Meningkatnya Hunian Layak dan Terjangkau di Wilayah Perkotaan						

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / IKS / IKP	SATUAN	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
IKP	Persentase Hunian Layak dan Terjangkau di Wilayah Perkotaan	%	100	100	100	100	100
	Persentase Peningkatan Penanganan Permukiman Kumuh di Wilayah Perkotaan	%	100	100	100	100	100
	Persentase Desa yang memiliki 100% rumah layak huni di wilayah perkotaan	%	100	100	100	100	100
PROGRAM	DUKUNGAN MANAJEMEN						
SS	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian PKP						
SP	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan						
IKP	Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	%	85,15	86,26	87,50	88,85	90,01

Sumber: Penjenjangan Kinerja Renstra Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan 2025-2029

Pemenuhan kebutuhan hunian yang layak, aman dan terjangkau di wilayah perkotaan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan melalui Program Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Program Dukungan Manajemen. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman mencakup program penyediaan hunian layak huni; peningkatan kualitas rumah tidak layak huni; peningkatan akses rumah tangga yang terfasilitasi pembiayaan perumahan; peningkatan akses penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan perkotaan; serta peningkatan kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan perkotaan.

Dalam rangka penguatan dukungan manajemen dan tata kelola di masing-masing unit kerja, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan menyusun beberapa kegiatan guna meningkatkan layanan dukungan manajemen dalam penyelenggaraan perumahan perkotaan. Sasaran Kegiatan (SK) serta Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dari setiap program yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 3
Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan 2025 – 2029

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/IKSS/IKP/IKK	SATUAN	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
UNIT ORGANISASI: DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN							
PROGRAM: PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							
SS 1	Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Efisien, Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan						
IKSS	1. Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak dan terjangkau yang difasilitasi	%	100	100	100	100	100
	2. Persentase luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	%	100	100	100	100	100
	3. Persentase desa yang memiliki 100% rumah layak huni	%	100	100	100	100	100
SP	Meningkatnya Hunian Layak dan Terjangkau di Wilayah Perkotaan						
IKSP	1. Persentase hunian layak dan terjangkau di wilayah perkotaan	%	100	100	100	100	100
	2. Persentase luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	%	100	100	100	100	100
	3. Persentase desa yang memiliki 100% rumah layak huni di wilayah perkotaan	%	100	100	100	100	100
Kegiatan 1	Penyelenggaraan Sistem Dan Strategi Perumahan Perkotaan						
Pelaksana	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan						
	SK : Meningkatkan kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan perkotaan						
	IKK : Tingkat kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan perkotaan	%	100	100	100	100	100
	IKK: Persentase desa yang mendapat intervensi penurunan RTLH di wilayah perkotaan	%	100	100	100	100	100
	IKK: Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan yang difasilitasi melalui intervensi tidak langsung di wilayah perkotaan	%	100	100	100	100	100

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/IKSS/IKP/IKK	SATUAN	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
Output Kegiatan	1. Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Strategi, Pemrograman, Anggaran dan Kemitraan Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	6	-	-	-	-
	2. Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Strategi, Pemrograman, Anggaran dan Kemitraan Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	-	25	25	25	25
	3. Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Dokumen	1	1	1	1	1
	4. Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Laporan	2	56	56	56	56
Kegiatan 2	Penyelenggaraan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan						
Pelaksana	Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan						
	SK : Meningkatnya akses penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan perkotaan						
	IKK : Tingkat fasilitasi lahan, perizinan dan penghunian perumahan perkotaan (keterangan: mencakup komponen pembinaan penyiapan lahan, perizinan, penghunian (50%) dan komponen penyiapan lahan, perizinan, penghunian	%	100	100	100	100	100
Output Kegiatan	1. Jumlah Rekomendasi Kebijakan Program, Anggaran, dan Rencana Teknis penyiapan lahan, perizinan dan penghunian di bidang perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	4	23	23	23	23
	2. Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyiapan Lahan Pembangunan Perumahan Perkotaan	Dokumen	1	-	-	-	-
	3. Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyiapan Lahan, Perizinan, dan Penghunian Perumahan Perkotaan	Dokumen	-	1	1	1	1
	4. Jumlah NSPK Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian di bidang pembangunan perumahan perkotaan	NSPK	1	1	1	1	1
	5. Jumlah Dokumen Dukungan Teknis Penyiapan Lahan Pembangunan Perumahan Perkotaan	Dokumen	1	-	-	-	-
	6. Jumlah Dokumen Dukungan Teknis Penyiapan Lahan Pembangunan Perumahan Perkotaan	Dokumen	-	2	2	2	2
	7. Jumlah Dokumen Dukungan Teknis Perizinan, dan Penghunian di bidang pembangunan perumahan perkotaan	Dokumen	4	-	-	-	-
	8. Jumlah Dokumen Dukungan Teknis Perizinan, dan Penghunian di bidang pembangunan perumahan perkotaan	Dokumen	-	3	3	3	3
	9. Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penyiapan Lahan, Perizinan, dan Penghunian perumahan perkotaan	Laporan	3	-	-	-	-

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/IKSS/IKP/IKK	SATUAN	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
	10. 1Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penyiapan Lahan, Perizinan, dan Penghunian perumahan perkotaan	Laporan	-	3	3	3	3
Kegiatan 3	Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan						
Pelaksana	Direktorat Pembiayaan Perumahan Perkotaan						
	SK : Meningkatnya akses rumah tangga yang terfasilitasi pembiayaan perumahan di wilayah perkotaan						
	IKK : Persentase rumah tangga yang terfasilitasi pembiayaan yang terjangkau di wilayah perkotaan	%	100	100	100	100	100
<i>Output Kegiatan</i>	1. Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	2	21	21	21	21
	2. Jumlah NSPK Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan	NSPK	3	3	3	3	3
	3. Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Penyaluran Bantuan / Kemudahan Pembiayaan Perumahan Perkotaan	Kegiatan	1	-	-	-	-
	4. Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Penyaluran Bantuan / Kemudahan Pembiayaan Perumahan Perkotaan	Kegiatan	-	1	1	1	1
	5. Jumlah Kesepakatan Kegiatan KPBU dan Pembiayaan Kreatif Perumahan Perkotaan yang Siap Dikerjasamakan	Kesepakatan	1	-	-	-	-
	6. Jumlah Kesepakatan Kegiatan Pembiayaan Kreatif dan Kemitraan Perumahan Perkotaan yang Dilaksanakan	Kesepakatan	-	1	1	1	1
	7. Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembiayaan Perumahan Perkotaan	Laporan	3	3	3	3	3
	8. Jumlah Orang yang Tersosialisasi Fasilitasi Pembiayaan Perumahan Perkotaan	Orang	-	100	100	100	100
Kegiatan 4	Penyediaan Rumah Yang Layak Huni di Perkotaan						
Pelaksana	Direktorat Pembangunan Perumahan Perkotaan						
	SK 1: Meningkatnya ketersediaan rumah baru layak huni di perkotaan						
	IKK 1: Persentase penyelenggaraan kebijakan, data dan informasi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembangunan perumahan perkotaan	%	100	100	100	100	100

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/IKSS/IKP/IKK	SATUAN	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
	IKK 2 : Persentase peningkatan ketersediaan rumah layak huni baru di wilayah perkotaan	%	100	100	100	100	100
	IKK 3 : Persentase penyediaan unit hunian vertikal yang terpadu di wilayah perkotaan	%	100	100	100	100	100
	IKK 4 : Persentase rumah yang mendapat prasarana, sarana, dan utilitas umum di perkotaan	%	100	100	100	100	100
	IKK 5 : Persentase rumah yang mendapat prasarana, sarana dan utilitas umum hunian vertikal	%	100	100	100	100	100
Output Kegiatan	1. Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan pembangunan Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	5	24	24	24	24
	2. Jumlah NSPK penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan	NSPK	1	1	1	1	1
	3. Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pembangunan Perumahan Perkotaan	Dokumen	1	1	1	1	1
	4. Jumlah laporan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan	Laporan	7	10	10	10	10
	5. Jumlah Pemeliharaan dan Perawatan Tower Rumah Susun Perkotaan	Unit	-	-	-	-	-
	6. Jumlah Rumah Susun Asrama Pendidikan Tinggi Perkotaan	Unit	-	-	-	-	-
	7. Jumlah Rumah Susun Asrama Pendidikan Keagamaan Perkotaan	Unit	-	-	-	-	-
	8. Jumlah Rumah Susun Asrama Pendidikan Perkotaan	Unit	-	199	-	-	-
	9. Jumlah rumah tapak yang mendapatkan bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) di perkotaan	Unit	-	5.708	5.708	5.708	5.708
	10. Jumlah Rumah Khusus Perumahan Perkotaan	Unit	-	9.210	9.210	9.210	9.210
	11. Jumlah Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan	Unit	100	156	-	-	-
	12. Jumlah Rumah Susun Hunian MBR/Pekerja Perumahan Perkotaan	Unit	-	65	-	-	-
	13. Jumlah Rumah Susun Hunian di Wilayah Perkotaan	Unit	-	2.789	3.380	3.510	3.510

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/IKSS/IKP/IKK	SATUAN	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
	14. Jumlah Rumah Susun ASN dan HANKAM (IKN) Perumahan Perkotaan	Unit	960	240	-	-	-
	15. Jumlah Unit yang mendapat bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Vertikal di Perkotaan	Unit	-	-	3.250	3.250	3.250
	SK 2 : Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu di wilayah perkotaan						
	IKK 2 : Persentase luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu di perkotaan	%	100	100	100	100	100
Output Kegiatan	1. Luas Permukiman Kumuh yang Ditangani Secara Terpadu di Wilayah Perkotaan	Hektar	-	68	66	68	66
	2. Jumlah Rumah Bersanitasi Layak di Wilayah Perkotaan	Unit	-	-	-	-	-
Kegiatan 5	Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan						
Pelaksana	Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan						
	SK 1 : Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan						
	IKK 1 : Persentase penyelenggaraan kebijakan, data dan informasi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan peningkatan kualitas pembangunan perumahan perkotaan	%	100	100	100	100	100
	IKK 2 : Persentase penyediaan unit rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan perkotaan	%	100	100	100	100	100
Output Kegiatan	1. Jumlah Rekomendasi Kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	6	24	24	24	24
	2. Jumlah Dokumen Data dan Informasi Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	Layanan	7	7	7	7	7
	3. Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	Laporan	6	4	4	4	4
	4. Jumlah Rumah Layak Huni yang Tersedia Melalui Peningkatan Kualitas di Perkotaan	Unit	5.412	83.125	83.125	83.125	83.125
	PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN						
SS 2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian PKP						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/IKSS/IKP/IKK	SATUAN	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
IKSS 1	Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PKP	%	84,9	86,7	88,5	90,3	91,8
SP	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan						
IKSP	Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	%	85,15	86,26	87,50	88,85	90,01
Kegiatan	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan						
Pelaksana	Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan						
	SK 1 : Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan						
	IKK 1 : Tingkat Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	%	87,15	87,80	88,62	89,54	90,29
<i>Output Kegiatan</i>	1. Jumlah Layanan BMN	Layanan	1	20	20	20	20
	2. Jumlah Layanan Hukum	Layanan	3	3	3	3	3
	3. Jumlah Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	3	3	3	3	3
	4. Jumlah Layanan Umum	Layanan	1	55	55	55	55
	5. Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1
	6. Jumlah Layanan Sarana Internal	Layanan	68	68	68	68	68
	7. Jumlah Layanan Manajemen SDM	Layanan	-	1	1	1	1
	8. Jumlah Layanan Pendidikan dan Pelatihan	Layanan	-	1	1	1	1
	9. Jumlah Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Layanan	1	1	1	1	1
	10. Jumlah Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Layanan	-	1	1	1	1

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/IKSS/IKP/IKK	SATUAN	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
	11. Jumlah Layanan Manajemen Keuangan	Layanan	2	2	2	2	2
	12. Jumlah Layanan Reformasi Kinerja	Layanan	-	1	55	55	55
	13. Jumlah Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	Layanan	-	1	1	1	1
Pelaksana	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan						
	SK 2 : Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan						
	IKK 2 : Tingkat Layanan Dukungan Manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	%	88,32	88,98	89,64	90,30	90,97
<i>Output Kegiatan</i>	1. Jumlah Layanan Umum	Layanan	1	1	1	1	1
	2. Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1
	3. Jumlah Layanan Data dan Informasi	Layanan	1	20	20	20	20
	4. Jumlah Layanan Reformasi Kinerja	Layanan	-	1	1	1	1
Pelaksana	Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan						
	SK 3 : Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan						
	IKK 3 : Tingkat Layanan Dukungan Manajemen Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan	%	88,88	89,35	89,82	90,29	90,76
<i>Output Kegiatan</i>	1. Jumlah Layanan Umum	Layanan	1	1	1	1	1
	2. Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1
	3. Jumlah Layanan Reformasi Kinerja	Layanan	-	1	1	1	1
Pelaksana	Direktorat Pembiayaan Perumahan Perkotaan						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/IKSS/IKP/IKK	SATUAN	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
	SK 4 : Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Direktorat Pembiayaan Perumahan Perkotaan						
	IKK 4 : Tingkat Layanan Dukungan Manajemen Direktorat Pembiayaan Perumahan Perkotaan	%	88,88	89,35	89,82	90,29	90,76
Output Kegiatan	1. Jumlah Layanan Umum	Layanan	1	1	1	1	1
	2. Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1
	3. Jumlah Layanan Reformasi Kinerja	Layanan	-	1	1	1	1
Pelaksana	Direktorat Pembangunan Perumahan Perkotaan						
	SK 5 : Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Direktorat Pembangunan Perumahan Perkotaan						
	IKK 5 : Tingkat Layanan Dukungan Manajemen Direktorat Pembangunan Perumahan Perkotaan	%	88,88	89,35	89,82	90,29	90,76
	Jumlah Layanan Umum	Layanan	1	1	1	1	1
	Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1
	Jumlah Layanan Reformasi Kinerja	Layanan	-	1	1	1	1
Pelaksana	Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan						
	SK 6 : Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan						
	IKK 6 : Tingkat Layanan Dukungan Manajemen Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	%	88,88	89,35	89,82	90,29	90,76
Output Kegiatan	1. Jumlah Layanan Umum	Layanan	1	1	1	1	1
	2. Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1
	3. Jumlah Layanan Reformasi Kinerja	Layanan	-	1	1	1	1

Sumber: Dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Tahun 2025 - 2029

2.2 Target *Output* Kegiatan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Tahun 2026

Target *output* kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Tahun 2026 disusun berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Tahun Anggaran 2026 Nomor: SP DIPA- 146.05.1.694311/2026 tanggal 01 Desember 2025 dan Pengesahan Revisi Anggaran ke-1 pada Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan tanggal 29 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 4
Tabel Target *Output* Kegiatan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Tahun 2026

NO	SASARAN/INDIKATOR	TARGET
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman		
1	7661.ABF Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana - Kebijakan, Kemitraan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan - Kebijakan Penyelenggaraan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan - Kebijakan Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan - Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan - Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	121 Rekomendasi Kebijakan
2	7661.AEA Koordinasi - Koordinasi Pembiayaan Perumahan Perkotaan	1 Kegiatan
3	7661.AEE Kemitraan - Kegiatan KPBU dan Pembiayaan Kreatif Perumahan Perkotaan yang Siap Dikerjasamakan	1 Kesepakatan
4	7611.AEF Sosialisasi dan Diseminasi Sosialisasi Fasilitas Pembiayaan Perumahan Perkotaan	1 Orang
5	7661.AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria - NSPK Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan - NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan Perkotaan - NSPK Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	5 NSPK
6	7661.BMA Data dan Informasi Publik - Data dan Informasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan - Data dan Informasi Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan - Data dan Informasi Pembangunan Perumahan Perkotaan - Data dan Informasi Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	10 Dokumen, Peta, Data
7	7661.CBB Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman - Rumah Susun Asrama Pendidikan Keagamaan	63 Unit, Hektar
8	7661.CBR Dukungan Teknis - Dukungan Teknis Penyiapan Lahan dan Perizinan Perumahan Perkotaan - Dukungan Teknis Penghunian Perumahan Perkotaan	5 Dokumen
9	7661.FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan - Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan - Pemantauan dan Evaluasi Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan	75 Laporan

NO	SASARAN/INDIKATOR	TARGET
	- Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan - Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan - Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	
10	7661.FAN Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden	1 Paket
11	7661.RBB Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman - PSU Perumahan Tapak Perkotaan - Stimulan Peningkatan Kualitas rumah Swadaya di Perkotaan - PSU Rumah Susun Perkotaan - Stimulan Pembangunan Rumah Swadaya di Perkotaan	122.093 unit, hektar - 600 unit - 120.000 unit - 75 Ha - 1.000 unit
Program Dukungan Manajemen		
1	7676.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal - Layanan BMN dan Manajemen Keuangan - Layanan Hukum dan Kerjasama - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal - Layanan Umum - Layanan Data dan Informasi - Layanan Perkantoran	110 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit
2	7676.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal - Layanan Sarana Internal	68 Unit, m2, Paket
3	7676.EBC Layanan Manajemen SDM Internal - Layanan Manajemen SDM - Layanan Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang, Layanan, Rekomendasi
4	7676.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal - Layanan Reformasi Kinerja - Layanan Penyelenggaraan Kearsipan - Layanan Perencanaan dan Penganggaran - Layanan Manajemen Keuangan	5 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi

Sumber: SP DIPA-146.05.1.694311/2026

2.3 Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Tahun 2026

Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Tahun 2026 sebagai berikut:



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Sri Haryati**
Jabatan : Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Maruarar Sirait**
Jabatan : Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2026

Pihak Kedua

Pihak Pertama

MARUARAR SIRAIT

SRI HARYATI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
1	Meningkatkan Hunia Layak dan Terjangkau di Wilayah Perkotaan	1 Persentase Hunian Layak dan Terjangkau di Wilayah Perkotaan	100%
		2 Persentase Peningkatan Penanganan Permukiman Kumuh di Wilayah Perkotaan	100%
		3 Persentase Desa yang memiliki 100% rumah layak huni di wilayah perkotaan	100%
2	Meningkatkan Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	1 Tingkat kualitas dukungan manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	86,26 %

PROGRAM

- 1 Perumahan dan Kawasan Permukiman
- 2 Dukungan Manajemen

PAGU APBN

Rp 3.061.385.645.000,00
Rp 12.543.534.000,00
Rp 3.073.929.179.000,00

Jakarta, Maret 2026

**MENTERI
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN

MARUARAR SIRAIT

SRI HARYATI

Gambar 2. 1
Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Tahun 2026
Sumber: Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, 2026

Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Tahun 2026 memuat 4 indikator kinerja sebagai alat ukur atas pencapaian kinerja sasaran program. Indikator-indikator tersebut antara lain: Persentase Hunian Layak dan Terjangkau di Wilayah Perkotaan dengan target sebesar 100%; Persentase Peningkatan Penanganan Permukiman Kumuh di Wilayah Perkotaan dengan target 100%; Persentase Desa yang memiliki 100% Rumah Layak Huni di Wilayah Perkotaan dengan target 100%; serta Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan dengan target 86,26%.

Adapun metode perhitungan dari masing-masing target indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 5
Metode Perhitungan Capaian Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

SASARAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya hunian layak dan terjangkau di wilayah Perkotaan	1	Persentase Hunian Layak dan Terjangkau di Wilayah Perkotaan	Indikator gabungan	Capaian dihitung dari penjumlahan indikator berikut:	Non Kumulatif	Internal dan Eksternal
				a Persentase hunian layak dan terjangkau melalui Intervensi langsung (bobot 70%) Capaian dihitung dari perbandingan realisasi intervensi langsung di wilayah perkotaan terhadap target tahunan, yaitu: Intervensi langsung (menggunakan APBN Kementerian PKP) adalah: Rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, serta bantuan kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan di wilayah perkotaan. Capaian (%) = $100 \times ((U+V+W+X)/B)$ Keterangan: U : Realisasi Rumah Khusus (unit) V : Realisasi Bantuan Rumah Swadaya (unit) W : Realisasi Rumah Susun (unit) X : Realisasi Rumah Tangga yang mendapat Bantuan Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan di Wilayah Perkotaan (unit) B : Target tahunan (unit) sesuai Lampiran PK		

SASARAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN		TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA

SASARAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
				b Persentase hunian layak dan terjangkau melalui Intervensi tidak langsung (bobot 10%) Capaian dihitung dari perbandingan realisasi intervensi tidak langsung di wilayah perkotaan terhadap target tahunan, yaitu: Jumlah rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan yang difasilitasi dengan sumber dana diluar APBN Kementerian PKP (unit). A= 100% x (P/B) Keterangan: A: Capaian Kinerja (%) Intervensi Tidak Langsung P: Realisasi rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan di wilayah perkotaan yang difasilitasi dengan sumber dana di luar APBN Kementerian PKP (unit) B: Target intervensi tidak langsung (unit)		
				c Persentase unit rumah yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) (bobot 20%) Capaian dihitung dari perbandingan realisasi jumlah unit rumah di wilayah perkotaan yang menerima bantuan PSU tapak dan vertikal terhadap target tahunan. A= 100 x ((P+Q)/B) Keterangan: A: Capaian Kinerja (%) P: Realisasi Rumah di wilayah perkotaan yang mendapat Bantuan PSU tapak (unit) Q: Realisasi Rumah di wilayah perkotaan yang mendapat Bantuan PSU vertikal (unit) B: Target tahunan PSU Tapak (Unit) dan PSU Vertikal (unit) sesuai PK		
	2	Persentase Peningkatan Penanganan Permukiman Kumuh di Wilayah Perkotaan	Indikator tunggal	Dihitung dari perbandingan luasan kumuh tertangani terhadap target luasan kumuh yang ditangani setiap tahun. Capaian Kinerja (%) = 100 x (U/target per tahun) Keterangan: A: Capaian Kinerja (%) U: Capaian luasan kumuh yang ditangani (hektar) Target per tahunan (hektar) sesuai PK	Non Kumulatif	Internal
	3		Indikator gabungan	Capaian dihitung dari penjumlahan indikator berikut:	Non Kumulatif	Internal

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
			a Persentase desa yang mendapat intervensi penurunan RTLH di wilayah perkotaan (bobot 90%). Capaian dihitung dari realisasi desa di wilayah perkotaan yang mendapat bantuan/intervensi penurunan RTLH dari Ditjen Perumahan Perkotaan terhadap target tahunan dikali 100%. Capaian (%) = $100 \times (\text{realisasi}/\text{target})$ Target tahunan sesuai PK		
	Persentase Desa yang memiliki 100% rumah layak huni di wilayah perkotaan		b Persentase desa yang memiliki 100% RLH (bobot 10%). Capaian Renstra Ditjen Perumahan Perkotaan 2025-2029 Capaian dihitung dari perbandingan realisasi desa di wilayah perkotaan yang mendapat bantuan/intervensi penurunan RTLH dari Ditjen Perumahan Perkotaan hingga memenuhi desa 100% RLH terhadap target tahunan. A = $100 \times ((U)/B)$ A= Capaian (%) B= Target penanganan jumlah desa tahunan (desa) U= Realisasi jumlah desa yang diintervensi oleh Ditjen Perumahan Perkotaan (desa) Target tahunan: 2025-2029: 45 desa/ tahun Total: 225 desa Kontribusi Unor terhadap Capaian RPJMN 2025-2029 Capaian dihitung dari perbandingan realisasi desa di wilayah perkotaan yang mendapat bantuan/intervensi penurunan RTLH dari Ditjen Perumahan Perkotaan hingga memenuhi desa 100% RLH terhadap target penanganan selama 2025-2029 yaitu 750 desa. A=Y+{(((U)/B))x 100}x(Z-Y)] A= Capaian (%) B= Target penanganan jumlah desa secara nasional yaitu 750 desa U= Realisasi jumlah desa yang diintervensi oleh Ditjen Perumahan Perkotaan (desa) Y= Baseline penanganan 2024 (24,81%) Z= Target penanganan pada 2029 (25,61%) Target tahunan (%): 2025-2029: 45 desa/ tahun		
Meningkatnya Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	Komposit dari indikator sebagai berikut:	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal (Penilaian terhadap pengelolaan arsip dinamis dan ketersediaan sumber daya kearsipan) oleh Biro Umum (10%)		

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		1. Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan	a. Pengelolaan Arsip Dinamis (50%) yang dihitung berdasarkan: 1) Pengendalian Naskah Dinas (25%) 2) Penggunaan Arsip (25%) 3) Pemeliharaan Arsip (25%) 4) Penyusutan Arsip (25%)	Non Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan)
			b. Sumber Daya Kearsipan (50%) yang dihitung berdasarkan : 1) SDM kearsipan (50%) 2) Prasarana dan Sarana Kearsipan (50%)	Non Kumulatif	Internal
		2. Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%)		
			a. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN (30%) pada setiap satuan kerja di lingkungan unit organisasi, yang dihitung berdasarkan: 1) Ketepatan waktu penyampaian usulan RKBMN (40%) 2) Ketepatan waktu penyampaian LBP (30%) 3) Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian Laporan Wasdal (30%)	Non Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan/Kegiatan/Usulan)
			b. Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN (30%) yang dihitung berdasarkan: (Jumlah permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0 yang ditindaklanjuti pada t-0) dibagi dengan (Jumlah keseluruhan permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0) dikali 100%	Non Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan/Kegiatan/Usulan)
			c. Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN (40%) pada setiap satuan kerja di lingkungan unit organisasi, yang dihitung berdasarkan jumlah BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya dibagi dengan total jumlah aset yang harus ditetapkan status penggunaannya dikali 100%	Non Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan/Kegiatan/Usulan)
		3. Tingkat Layanan pembentukan produk hukum	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%)		
			a. Tingkat efektivitas penyelesaian produk hukum: (25%) Jumlah usulan produk hukum (Surat Edaran, Juknis, Surat Keputusan Dirjen) yang terselesaikan dibagi dengan jumlah usulan produk hukum dikali 100%	Non Kumulatif	Internal dan eksternal
			b. Tingkat Efektivitas Penyusunan Perjanjian: (25%) Jumlah usulan Perjanjian yang terselesaikan dibagi dengan jumlah Perjanjian dikali 100%	Non Kumulatif	Internal dan eksternal
			c. Tingkat Efektivitas Penyusunan Pertimbangan Hukum: (25%)	Non Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan/Kegiatan/Usulan)

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
			Jumlah usulan Pertimbangan Hukum yang terselesaikan dibagi dengan jumlah Pertimbangan Hukum dikali 100%		
			d. Tingkat efektivitas advokasi hukum: (25%) Jumlah perkara yang ditangani dibagi dengan jumlah perkara dikali 100%	Non Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan/Kegiatan/Usulan)
		4. Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian organisasi tata laksana	Tingkat kepuasan layanan pembinaan, pengelolaan kepegawaian, dan organisasi tata laksana yang diselesaikan tepat waktu (10%)	Non Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan/Kegiatan/Usulan)
		5. Nilai Kinerja Anggaran	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%)		
			a. Nilai IKPA Unit Organisasi berdasarkan aplikasi MONEV-PA (60%)	Non Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan/Kegiatan/Usulan)
			b. Nilai Pagu Minus di Unit Organisasi persentase jumlah total pagu dikurangi dengan nilai pagu minus unit organisasi (20%)	Non Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan/Kegiatan/Usulan)
			c. Persentase satuan kerja yang dilakukan pembinaan kinerja pelaksanaan anggaran dibandingkan dengan total satuan kerja di Unit Organisasi (20%)	Non Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan/Kegiatan/Usulan)
		6. Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI	Persentase jumlah rekomendasi atas temuan BPK-RI yang sudah ditindaklanjuti terhadap total jumlah Rekomendasi yang ditampilkan di SIPTL BPK-RI dikali 100% (10%)	Non Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan/Kegiatan/Usulan)
		7. Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Organisasi	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%)		Internal (Prosiding/Laporan/Kegiatan/Usulan)
			a. Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan AKIP yang wajib diselesaikan Unit Organisasi dikali 100% (80%)	Non Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan/Kegiatan/Usulan)
			b. Nilai Evaluasi AKIP Unit Organisasi (20%)	Non Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan/Kegiatan/Usulan)
		8. Tingkat Layanan Komunikasi Publik	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%)		
			a. Persentase sentimen pemberitaan positif dan netral di media, dibandingkan dengan jumlah total pemberitaan (50%)	Non Kumulatif	Internal dan Eksternal

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
			b. Persentase jumlah pelayanan publik yang ditindaklanjuti terhadap pemohon pelayanan publik (50%)	Non Kumulatif	Internal dan Eksternal
		9. Tingkat Layanan Manajemen Data Unit Organisasi	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman terhadap kebutuhan data (10%)	Non Kumulatif	Internal dan Eksternal
		10. Tingkat Kualitas Laporan Penyelenggaraan SPIP	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%)		
			a. Jumlah Laporan Penyelenggaraan SPIP Unit Kerja di lingkungan Unit Organisasi yang tepat waktu (40%)	Non Kumulatif	Internal
			b. Terselenggaranya Penilaian Mandiri Maturitas SPIP di Unit Organisasi (40%)	Non Kumulatif	Internal
			c. Nilai Komponen Struktur dan Proses Maturitas SPIP di Unit Organisasi (20%)	Non Kumulatif	Internal

Sumber: Metode Perhitungan Capaian Dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan 2025-2029

2.4 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2026

Berdasarkan Surat Pengesahan DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Tahun 2026 Nomor: SP DIPA-146.05.1.694311/2026 tanggal 01 Desember 2025 dan dan Pengesahan Revisi Anggaran ke-1 pada Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan tanggal 29 Desember 2025, alokasi anggaran Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan memiliki total sebanyak Rp3.073.929.179.000, dengan rincian anggaran untuk Program Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Rp3.061.385.645.000 dan untuk Program Dukungan Manajemen adalah Rp12.543.534.000. Adapun rincian anggaran pada seluruh entitas kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan sebagai berikut:

Tabel 2. 6
DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Tahun 2026

NO	SASARAN/INDIKATOR	TARGET	ALOKASI ANGGARAN (Rp)
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman			3.061.385.645.000
1	7661.ABF Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana - Kebijakan, Kemitraan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan - Kebijakan Penyelenggaraan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan - Kebijakan Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan - Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan - Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	121 Rekomendasi Kebijakan	11.098.544.000
2	7661.AEA Koordinasi - Koordinasi Pembiayaan Perumahan Perkotaan	1 Kegiatan	153.315.000
3	7661.AEE Kerjasama - Kegiatan KPBU dan Pembiayaan Kreatif Perumahan Perkotaan yang Siap Dikerjasamakan	1 Kesepakatan	422.168.000
4	7611.AEF Sosialisasi dan Diseminasi - Sosialisasi Fasilitasi Pembiayaan Perumahan Perkotaan	1 Orang	199.515.000
5	7661.AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria - NSPK Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan - NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan Perkotaan - NSPK Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	5 NSPK	524.978.000
6	7661.BMA Data dan Informasi Publik - Data dan Informasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan - Data dan Informasi Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan - Data dan Informasi Pembangunan Perumahan Perkotaan - Data dan Informasi Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	10 Dokumen, Peta, Data	1.833.512.000
7	7661.CBB Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman - Rumah Susun Asrama Pendidikan Keagamaan	63 Unit, Hektar	36.000.000.000
8	7661.CBR Dukungan Teknis	5 Dokumen	1.441.304.000

NO	SASARAN/INDIKATOR	TARGET	ALOKASI ANGGARAN (Rp)
	- Dukungan Teknis Penyiapan Lahan dan Perizinan Perumahan Perkotaan - Dukungan Teknis Penghunian Perumahan Perkotaan		
9	7661.FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan - Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan - Pemantauan dan Evaluasi Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan - Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan - Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan - Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	75 Laporan	6.492.497.000
10	7661.FAN Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden - Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden	1 Paket	167.245.712.000
11	7661.RBB Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman - PSU Perumahan Tapak Perkotaan - Stimulan Peningkatan Kualitas rumah Swadaya di Perkotaan - PSU Rumah Susun Perkotaan - Stimulan Pembangunan Rumah Swadaya di Perkotaan	122.093 unit, hektar - 600 unit - 120.000 unit - 75 Ha - 1.000 unit	2.835.974.100.000
Program Dukungan Manajemen			12.543.534.000
1	7676.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal - Layanan BMN dan Manajemen Keuangan - Layanan Hukum dan Kerjasama - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal - Layanan Umum - Layanan Data dan Informasi - Layanan Perkantoran	110 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	11.527.407.000
2	7676.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal - Layanan Sarana Internal	68 Unit, m2, Paket	454.977.000
3	7676.EBC Layanan Manajemen SDM Internal - Layanan Manajemen SDM - Layanan Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang, Layanan, Rekomendasi	89.716.000
4	7676.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal - Layanan Reformasi Kinerja - Layanan Penyelenggaraan Kearsipan - Layanan Perencanaan dan Penganggaran - Layanan Manajemen Keuangan	5 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	471.434.000

Sumber: SP DIPA-146.05.1.694311/2026

2.5 Target Kinerja Triwulan

Salah satu komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yaitu Perjanjian Kinerja, memuat penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan di bawahnya untuk melaksanakan program/kegiatan berdasarkan Indikator Kinerja.

2.5.1 Target Kinerja Triwulan berdasarkan Perjanjian Kinerja

Dalam pelaksanaannya, target yang termuat dalam Perjanjian Kinerja dirincikan ke dalam suatu Rencana Aksi Kinerja yang memuat target kinerja triwulan dari target

tahunan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan Rencana Aksi Kinerja tersebut akan menjadi dasar dalam penyelenggaraan komponen SAKIP berikutnya. Target kinerja triwulan yang disusun merupakan ukuran kuantitatif dari setiap indikator kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai pada tahun tersebut sesuai dengan dokumen anggaran. Berikut kami sampaikan Target Kinerja Triwulan pada Unit Organisasi Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Tahun Anggaran 2026.

Tabel 2. 7 Target Rencana Aksi Kinerja di Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan TA 2026

PROGRAM/SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET PK (%)	TARGET CAPAIAN PER TRIWULAN			
			TW I (%)	TW II (%)	TW III (%)	TW IV (%)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman						
Sasaran Program: Meningkatnya hunian layak dan terjangkau di wilayah Perkotaan						
1.	Persentase Hunian Layak dan Terjangkau di Wilayah Perkotaan	100,00	24,13	46,92	73,08	100,00
2.	Persentase Peningkatan Penanganan Permukiman Kumuh di Wilayah Perkotaan	100,00	5,00	30,00	70,00	100,00
3.	Persentase Desa yang Memiliki 100% Rumah Layak Huni di Wilayah Perkotaan	100,00	12,00	34,00	62,00	100,00
Program Dukungan Manajemen						
Sasaran Program: Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan						
4.	Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	86,26	20,57	36,09	57,78	86,26

Sumber : Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, 2026

Keterangan :

- Kolom (1) adalah Sasaran Program beserta indikatornya;
- Kolom (2) adalah besaran target yang tercantum dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Awal sesuai dengan indikator pada kolom (1);
- Kolom (3) s.d (6) adalah besaran (%) target kinerja yang diharapkan untuk dicapai dalam waktu triwulan (3 bulan);
- Pengisian Target capaian per triwulan bersifat kumulatif (%)
- Apabila terdapat revisi Perjanjian Kinerja, maka kolom (2) diisi dengan besaran target yang tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja Revisi dan kolom (3) diisi dengan besaran (%) target yang diharapkan untuk dicapai dalam waktu triwulan terhadap target revisi Perjanjian Kinerja;

Dalam menetapkan target kinerja triwulan masing-masing indikator kinerja program, dilakukan pendetailan pada komponen pembentuk indikator tersebut, dengan penjelasan sebagai berikut:

- Persentase Hunian Layak dan Terjangkau di Wilayah Perkotaan terdiri dari kegiatan pembangunan perumahan di wilayah perkotaan dan semua kegiatan terkait kebijakan, pelaksanaan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK), bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, serta administrasi di bidang perumahan perkotaan. Sesuai DIPA yang diberikan pada Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan pada Tahun Anggaran 2026, maka kegiatan pembangunan perumahan antara lain adalah Pembangunan Rumah Susun Lanjutan IKN yang terdiri atas

Hunian Vertikal TNI dan Rusun MBR IKN; Pembangunan Rumah Susun Mahkamah Agung; Pembangunan Rumah Susun Kejaksaan Tinggi, Pembangunan Rumah Susun BPKP; Pemeliharaan dan Perawatan Rumah Susun; Kegiatan Peningkatan Kualitas melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS); serta kegiatan terkait Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU).

Komponen lain yang mendukung terselenggaranya hunian layak dan terjangkau di wilayah perkotaan adalah kegiatan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Target FLPP tidak termuat dalam DIPA, sehingga perhitungannya mengacu pada target yang termuat dalam Dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Tahun 2025 – 2029. Di sisi lain, penentuan target juga melibatkan kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan berupa intervensi tidak langsung, di mana kegiatan tersebut tidak memiliki target yang tercantum dalam Dokumen Perjanjian Kinerja, namun realisasinya tetap digunakan dalam metode perhitungan capaian Indikator “Persentase Hunian Layak dan Terjangkau di Wilayah”.

2. Persentase Peningkatan Penanganan Permukiman Kumuh di Wilayah Perkotaan pada tahun 2026 dihitung menggunakan pendekatan pelaksanaan program/kegiatan Pemugaran Kumuh Perkotaan serta program/kegiatan terkait sanitasi yang mulai dianggarkan dalam DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Tahun Anggaran 2026.
3. Persentase Desa yang memiliki 100% Rumah Layak Huni di Wilayah Perkotaan dihitung melalui pendekatan intervensi penurunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di wilayah perkotaan. Bentuk intervensi penurunan RTLH yaitu melalui Program Peningkatan Kualitas Perumahan berupa kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

2.5.2 Target Kinerja Triwulan Berdasarkan Klasifikasi Rincian *Output* / Rincian *Output* (KRO/RO)

Target kinerja triwulan berdasarkan klasifikasi rincian *output* atau rincian *output* (KRO/RO) merupakan ukuran kuantitatif dari setiap Indikator Kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai pada tahun tersebut sesuai dengan dokumen anggaran. Anggaran yang digunakan bertujuan untuk mewujudkan sasaran merupakan anggaran yang didasarkan pada DIPA pada tahun berjalan. Target kinerja triwulan berdasarkan KRO/RO Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 8
Target Kinerja Triwulan Berdasarkan KRO/RO

No.	Sasaran Program/Indikator Kinerja Program	Target (%)	Target Capaian Kinerja (%)			
			Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
A	DUKUNGAN MANAJEMEN					
	PUSAT					
	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	100,00	25,12	22,75	22,14	29,99
	EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	100,00	30,00	20,00	20,00	30,00
	EBC-Layanan Manajemen SDM Internal	100,00	24,38	21,88	18,13	35,63
	EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal	100,00	23,97	23,42	21,81	30,80
	BALAI					
	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	100,00	23,33	23,33	23,33	30,00
	SATKER					
	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	100,00	35,00	15,00	15,00	35,00
B	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
	PUSAT					
	ABF-Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	100,00	18,91	27,37	29,38	24,34
	AEA-Koordinasi	100,00	25,00	25,00	30,00	20,00
	AEE-Kemitraan	100,00	20,00	25,00	40,00	15,00
	AEF-Sosialisasi dan Diseminasi	100,00	40,00	10,00	15,00	35,00
	AFA-Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria	100,00	22,50	26,67	26,67	24,17
	BMA-Data dan Informasi Publik	100,00	22,50	27,75	25,88	23,88
	CBB-Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman	100,00	-	-	-	-
	CBR-Dukungan Teknis	100,00	20,00	31,00	31,00	18,00
	FAE-Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	100,00	16,62	26,42	28,11	28,86
	FAN-Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden	100,00	-	-	-	-
	RBB-Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman	100,00	35,00	28,86	16,93	19,21
	BALAI					
	ABF-Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	100,00	18,91	27,37	29,38	24,34
	FAE-Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	100,00	19,50	25,00	28,00	27,50
	SATKER					
	FAE-Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	100,00	19,50	25,00	28,00	27,50
	RBB-Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman	100,00	26,00	41,00	23,50	9,50

Sumber: Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, 2026

2.6 Kegiatan Tematik di Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

2.6.1 Program Gentengisasi

Gentengisasi merupakan gerakan nasional untuk mendorong penggantian atap bangunan yang saat ini masih menggunakan seng (lembaran logam) menjadi genteng. Genteng yang digunakan menggunakan material tanah liat atau material lain yang dinilai lebih sesuai dengan karakteristik rumah dan kondisi lingkungan. Gerakan Gentengisasi memiliki tiga tujuan, yaitu: meningkatkan kenyamanan hunian, meningkatkan estetika lingkungan permukiman, menguatkan karakter visual arsitektur nusantara dan menggerakkan ekonomi

lokal. Untuk menunjang pelaksanaan Program Gentengisasi, Presiden Republik Indonesia menekankan pentingnya pemanfaatan genteng yang diproduksi menggunakan bahan material lokal dalam negeri dengan harapan dapat menghidupkan kembali UMKM dan produsen genteng lokal di berbagai daerah.

Program Gentengisasi merupakan visi besar dari Presiden Prabowo Subianto untuk merevitalisasi hunian masyarakat dengan mengganti atap seng pada rumah-rumah warga dengan genteng yang lebih berkualitas dan tahan lama, yang disampaikan pada Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul, Bogor pada bulan Februari 2026. Berdasarkan hasil kunjungan ke industri genteng tanah liat di Provinsi Jawa Barat, didapatkan estimasi kebutuhan total genteng di Jawa Barat dari kebutuhan FLPP, BSPS, dan CSR adalah 100.975.000 genteng per tahun, di mana kapasitas produksi genteng di Majalengka, Purwakarta, dan Cirebon saat ini mencapai total 1.134.000 buah per hari, sehingga sudah dianggap mampu memenuhi *demand* di Jawa Barat. Di sisi lain, berdasarkan kunjungan pada industri genteng di Jawa Barat didapatkan beberapa rekomendasi antara lain:

- a. Majalengka menjadi *pilot project* genteng tanah liat untuk program BSPS yang lokasinya berdekatan dengan Majalengka;
- b. Penggunaan genteng (tanah liat dan beton) untuk renovasi rumah CSR;
- c. Penggunaan genteng untuk program perumahan pemerintah seperti rumah khusus dan rumah susun;
- d. Kementerian PKP memfasilitasi kebutuhan bahan baku seperti *flying ash* yang non B3 dan batu abu untuk genteng beton;
- e. Pemetaan cadangan bahan baku dan fasilitasi perizinan untuk tanah liat;
- f. Mengusulkan gentengisasi untuk menggantikan atap seng dengan genteng menggunakan dana dari APBN.

2.6.2 Rencana Pembangunan Rusun Subsidi Meikarta Cikarang

Pembangunan Rumah Susun Subsidi Meikarta direncanakan pada tiga lokasi, yaitu lokasi pertama berada di Desa Cibatu, Cikarang Selatan dengan luas 10,1 Ha; lokasi kedua berada di Desa Jayamukti, Cikarang Pusat dengan luas 10 Ha; serta lokasi ketiga di Desa Pasir Sari, Cikarang Selatan dengan luas lahan 10,3 Ha.

Rencana pembangunan Rusun Subsidi Meikarta merupakan salah satu solusi yang diberikan atas kebutuhan masyarakat akan hunian. Berdasarkan survei peminatan rusun bersubsidi Meikarta kepada 547 responden, didapatkan hasil bahwa sebesar 73% dari total responden memiliki minat untuk membeli, dengan mayoritas masyarakat tersebut bekerja di kawasan industri Cikarang.

Pembangunan Rusun Subsidi Meikarta Cikarang direncanakan diawali dengan kegiatan pembersihan lahan yang dilakukan mulai bulan Januari 2026 hingga Maret 2026, serta akan

dilakukan *groundbreaking* pada bulan Maret 2026. Setelah itu, pekerjaan pondasi direncanakan untuk dilaksanakan pada bulan Maret hingga Agustus 2026 dengan perkiraan seluruh pekerjaan akan selesai dan dilaksanakan serah terima unit pada tanggal 17 Agustus 2028.



Gambar 2. 2
Rencana Lokasi Pembangunan Rusun Subsidi Meikarta Cikarang
Sumber: Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, 2026

2.6.3 Penataan Kawasan Kumuh menjadi Kampung Gotong Royong Menteng Tenggulun

Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat, merupakan salah satu kawasan dengan tingkat kesenjangan tinggi dan masuk ke dalam kategori kawasan padat penduduk (kawasan kumuh). Program penataan kawasan kumuh Menteng Tenggulun merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian PKP dengan pihak lain yang terdiri atas BPS RI, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, CSR Gotong Royong, IAI Jakarta, *Ladies Bankers*, PT SMF, PT PNM, serta PT Pulau Intan. Dalam hal ini, Kementerian PKP berperan sebagai fasilitator dan koordinator yang didukung oleh konsultan perencana.

Kegiatan penataan kawasan kumuh menjadi Kampung Gotong Royong meliputi kegiatan penanganan 52 RTLH yang terdiri dari 29 renovasi unit rumah (2 unit telah selesai), 23 renovasi rumah dan UMKM; penataan lorong; penataan koridor; serta pendampingan UMKM. Kegiatan yang meliputi pekerjaan renovasi dan penataan kawasan direncanakan dimulai pada bulan Februari 2026 hingga Juli 2026, kemudian akan dilakukan pemeliharaan oleh PT Pulau Intan pada bulan Agustus 2026 hingga Januari 2027. Dalam pelaksanaan penataan kawasan kumuh Menteng Tenggulun, total kebutuhan biaya yang diperlukan adalah RP4.837.780.000 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kegiatan penataan lorong koridor sepanjang ± 800 meter dengan biaya Rp1.984.000.000, yang terdiri dari kegiatan beautifikasi kawasan, pembuatan IPAL, pembuatan toilet komunal, pembuatan lahan parkir, penyediaan kios portabel, serta pembangunan anjungan Sungai Ciliwung;
- b. Kegiatan Renovasi pada 50 RTLH membutuhkan biaya sebanyak Rp2.703.780.000 dengan kegiatan yang terdiri atas renovasi 23 RTLH + UMKM, renovasi 27 RTLH, serta renovasi 10 UMKM;
- c. Pembiayaan kontrakan untuk CPB selama rumahnya direnovasi sebesar Rp150.000.000 dengan rincian Rp1.000.000/bulan untuk 50 rumah dalam kurun waktu selama tiga bulan.

2.6.4 Rumah Susun Sewa Senen, Jakarta Pusat

Pembangunan Rusun Sewa (Rusunawa) Senen, Jakarta Pusat dilatar belakangi oleh kawasan bantaran rel KA Senen masih terdapat permukiman kumuh dan hunian tidak layak yang berisiko bagi keselamatan, kesehatan, dan kualitas hidup masyarakat. Hasil peninjauan langsung Presiden RI pada 26 Maret 2026 menegaskan perlunya langkah cepat untuk menyediakan hunian yang layak, aman, dan tertata melalui penataan kawasan dan relokasi warga ke hunian vertikal. Selain itu tersedia alternatif lahan strategis di sekitar lokasi yang berpotensi dikembangkan menjadi rusun skala besar bagi warga terdampak dan MBR, sekaligus mengoptimalkan lahan perkotaan serta meningkatkan kualitas lingkungan.

Lokasi lahan pembangunan Rusun ini berada di Jl. Kramat, Senen, Jakarta Pusat merupakan lahan milik Angkasa Pura dengan luas lahan 1.610 Ha yang berjarak kurang dari 800m dari Stasiun Kereta Api Pasar Senen. Selain dekat dengan Stasiun KA Pasar Senen, lokasi ini juga dekat dengan fasilitas umum dan sosial seperti Pasar Gaplok, Universitas BSI Kampus Kramat 98, SPBU Pasar Senen, dan lain-lain.

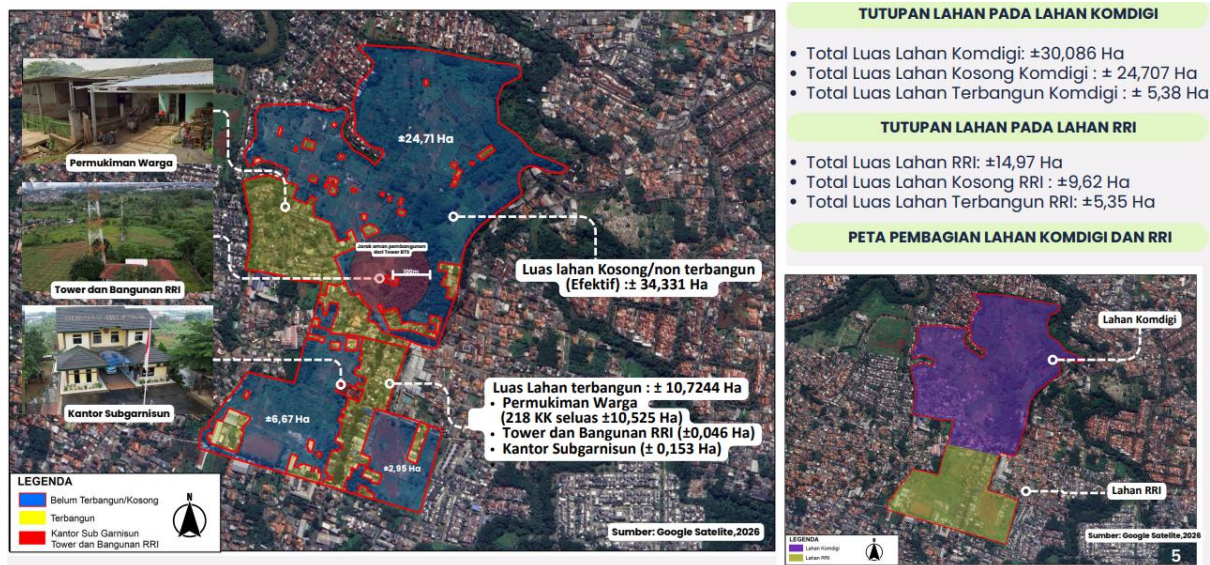


Gambar 2. 3
Rencana Lokasi Pembangunan Rusunawa Senen
Sumber: Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, 2026

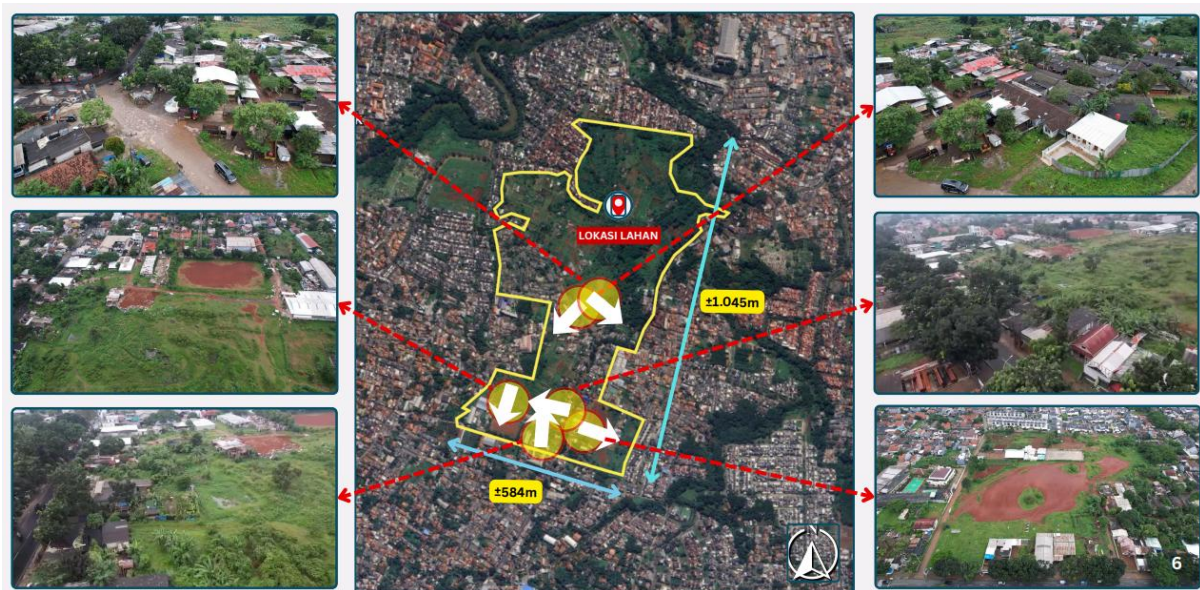
Rusunawa Senen ini direncanakan akan dibangun diatas tanah BUMN dengan skema pembangunan melalui CSR yang kemudian Aset Rusun akan dihibahkan ke BUMN terkait yang pengeolaannya bisa dilakukan oleh BUMN ataupun dengan skema kerjasama dimana BUMN sebagai operator dengan skema pembayaran subsidi Pemerintah. Konsep usulan desain untuk Rusunawa Senen terdiri dari 4 Tower dengan total 1600 unit tipe 45 dilengkapi dengan fasilitas ibadah dan juga komersial. Jadwal pembangunan rusunawa ini dimulai pada bulan april 2026 dan selesai pada bulan Desember 2027.

2.6.5 Rencana Pembangunan Rusun Subsidi di Lahan Komdigi

Rencana Pembangunan Rumah Susun di Lahan Komdigi berada di Kelurahan Tirtajaya, Sukamaju, Depok, Jawa Barat. Pembangunan Rusun ini rencananya akan menggunakan lahan seluas 45,06 Ha dengan rincian berupa lahan kosong seluas 23,64 Ha dan lahan okupasi masyarakat seluas 21,42 Ha. Pada kondisi eksisting, lahan yang rencananya akan dibangun rusun tersebut saat ini berupa tanah kosong, sebagian diokupasi masyarakat, terdapat Kantor Sub-Garnisun 0508 (MABES TNI) Depok, serta terdapat bangunan dan tower RRI.



Gambar 2. 4
Klasifikasi Area Lahan Terbangun / Non Terbangun Rusun Lahan Komdigi
Sumber: Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, 2026



Gambar 2. 5
Dokumentasi Foto Udara Rusun Subsidi Lahan Komdigi
Sumber: Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, 2026

Rencana pembangunan rusun di lahan Komdigi dibagi menjadi dua tahap, antara lain:

- Rencana Pembangunan Tahap 1 meliputi pemanfaatan lahan efektif seluas $23,64$ Ha yang menjadi *quick win development* karena tidak memerlukan relokasi dan dapat langsung dimulai setelah perencanaan teknis final. Pembangunan pada tahap I direncanakan sebanyak 11 tower dengan dua tipe unit rusun yaitu tipe 24 (5.940 unit) dan tipe 36 (5.940 unit);

- b. Rencana Pembangunan Tahap 2 akan dilakukan pada lahan seluas 21,42 Ha berupa pengembangan lanjutan pada lahan yang saat ini masih terdapat okupasi masyarakat. Pembangunan pada tahap 2 terdiri atas 13 tower dengan dua tipe unit rusun yaitu tipe 24 (7.020 unit) dan tipe 36 (7.020 unit).



BAB 3

PENUTUP



BAB III

PENUTUP

Dokumen Rencana Aksi Kinerja (Renaksi) Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2026 merupakan dokumen strategis yang disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan. Dokumen ini disusun dengan mengacu pada anggaran (DIPA) yang diberikan kepada Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, serta mendukung pencapaian target nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Dokumen ini menekankan komitmen pemerintah dalam mewujudkan hak dasar warga negara atas hunian layak, aman, terjangkau, dan berkelanjutan di wilayah perkotaan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (1), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Secara keseluruhan, Dokumen Renaksi difokuskan pada upaya untuk mengatasi isu strategis utama di bidang perumahan perkotaan, yaitu tingginya *backlog* perumahan (meliputi *backlog* kepemilikan sebanyak 9,9 juta rumah tangga dan *backlog* kualitas sebanyak 26,9 juta rumah tangga berdasarkan data tahun 2024), keterbatasan lahan serta lonjakan harga tanah akibat urbanisasi yang diproyeksikan mencapai 70% penduduk perkotaan pada tahun 2045, dan akses pembiayaan yang terbatas meskipun telah dikembangkan skema seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT), dan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Isu-isu ini menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan yang terintegrasi, dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabilitas, transparansi, serta sinergi lintas sektoral untuk mendukung agenda nasional seperti Reformasi Birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Proyek Strategis Nasional (PSN) Nomor 75 tentang Pembangunan 3 Juta Rumah Nasional.

Tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PKP Nomor 1 Tahun 2024, mencakup perumusan kebijakan, pelaksanaan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK), bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, serta administrasi di bidang perumahan perkotaan. Tujuan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan adalah meningkatkan persentase rumah

tangga dengan akses hunian layak dan terjangkau di perkotaan melalui dua program utama yaitu Program Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Program Dukungan Manajemen.

Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Tahun 2026 menetapkan target 100% untuk Persentase Hunian Layak dan Terjangkau di Wilayah Perkotaan (dengan target 1.000.000 unit rumah secara nasional), 100% untuk Persentase Peningkatan Penanganan Permukiman Kumuh di Wilayah Perkotaan, dan Persentase Desa yang memiliki 100% rumah layak huni di Wilayah Perkotaan serta 86,26% untuk Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, dengan metode perhitungan berbasis realisasi terhadap target tahunan yang melibatkan data internal dan eksternal.

Secara keseluruhan, Dokumen Renaksi ini dirancang sebagai *roadmap* untuk mewujudkan pembangunan dan renovasi 1 juta rumah di perkotaan dengan pendekatan kolaboratif melibatkan pemerintah pusat, daerah, sektor swasta, dan masyarakat. Dokumen ini diharapkan menjadi pedoman efektif untuk mengurangi *backlog* perumahan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta mendukung transformasi ekonomi nasional melalui sektor perumahan yang berkontribusi pada PDB.



LAMPIRAN

LAMPIRAN

LAMPIRAN I. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	INDIKAS I LOKASI	TARGET						ANGGARAN (Rp Ribu)					
				2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
UNIT ORGANISASI: DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN															
PROGRAM: PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN															
SASARAN Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan										STRATEGIS:					
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS															
1	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak dan Terjangkau yang difasilitasi	%		100	100	100	100	100	100	4.178.150.909	29.341.862.807	30.533.264.997	32.360.981.182	38.812.864.745	130.227.124.640
2	Persentase luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	%		100	100	100	100	100	100	392.000.000	429.420.000	442.000.000	463.000.000	484.000.000	2.210.420.000
3	Persentase Desa yang memiliki 100% rumah layak huni (%)	%		100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
SASARAN PROGRAM:															
Meningkatnya hunian layak dan terjangkau di wilayah Perkotaan															
INDIKATOR KINERJA PROGRAM:															
Unor PIC dan Pelaksana KP Jumlah Penyediaan Unit Hunian Vertikal yang terpadu (Milik dan Sewa)															
1	Persentase Hunian Layak dan Terjangkau di Wilayah Perkotaan	%		100	100	100	100	100	100	2.373.597.281	12.577.352.898	12.915.943.954	13.774.425.925	14.387.525.327	56.028.845.385
Unor Kontributor IKP Luasan Hektar Permukiman Kumuh yang ditangani secara terpadu															
2	Persentase Peningkatan Penanganan Permukiman Kumuh di Wilayah Perkotaan	%		100	100	100	100	100	100	0	143.140.000	145.860.000	157.420.000	159.720.000	606.140.000
Unor Pelaksana KP Peersentase desa yang memiliki 100% rumah layak huni															
3	Persentase Desa yang memiliki 100% rumah layak huni di wilayah perkotaan	%		100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0
KEGIATAN 1: Penyelenggaraan Sistem dan Strategi Perumahan Perkotaan (7661-Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan)															
SASARAN KEGIATAN:															
Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan															
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:															
1	Tingkat kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan perkotaan	%		100	100	100	100	100	100	6.402.098	17.587.603	18.537.334	19.538.349	20.593.420	82.658.804
UK Pelaksana KP Persentase desa yang memiliki 100% rumah layak huni															

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	INDIKASI LOKASI	TARGET						ANGGARAN (Rp Ribu)					
				2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2	Persentase desa yang mendapat intervensi penurunan RTLH di wilayah perkotaan	%		100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
3	Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan yang difasilitasi melalui intervensi tidak langsung di wilayah perkotaan	%		100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
PELAKSANA: Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perkotaan															
OUTPUT KEGIATAN:															
	KRO 7661.AB F	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana													
1	RO ABF.001	Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Rekamen dari Kebijakan	6	-	-	-	-	6	4.380.148	-	-	-	-	4.380.148
2	RO ABF.006	Kebijakan, Kemitraan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Rekamen dari Kebijakan	-	25	25	25	25	100	-	8.958.865	9.442.644	9.952.546	10.489.984	38.844.039
	KRO 7661.BM A	Data dan Informasi Publik													
3	RO BMA.001	Data dan Informasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Dokumen	1	1	1	1	1	5	701.000	1.307.331	1.377.927	1.452.335	1.530.761	6.369.354
	KRO 7661.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan													
4	RO FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Laporan	2	56	56	56	56	226	1.320.950	7.321.407	7.716.763	8.133.468	8.572.675	33.065.264
KEGIATAN 2: Penyelenggaraan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan (7661-Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan)															
SASARAN KEGIATAN:															
Meningkatnya Akses Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan															
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:															
1	Tingkat fasilitasi lahan, perizinan dan penghunian perumahan perkotaan (keterangan: mencakup komponen pembinaan penyiapan lahan, perizinan, penghunian (50%) dan komponen penyiapan lahan, perizinan, penghunian (50%))	%		100	100	100	100	100	100	7.986.611	8.191.551	8.633.894	9.100.125	9.591.532	43.503.713
PELAKSANA: Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan															
OUTPUT KEGIATAN:															
	KRO 7661.AB F	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana													
1	RO ABF.002	Kebijakan Penyelenggaraan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan	Rekamen dari Kebijakan	4	23	23	23	23	96	2.767.460	3.797.879	4.002.964	4.219.125	4.446.957	19.234.385

PROGRAM/ KEGIATAN		SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR		SATUAN	INDIKASI LOKASI	TARGET					ANGGARAN (Rp Ribu)						
						2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
(1)		(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	KRO	7661.BM A	Data dan Informasi Publik														
2	RO	BMA.002	Data dan Informasi Penyiapan Lahan Pembangunan Perumahan Perkotaan	Dokumen		1	-	-	-	-	1	588.040	-	-	-	-	588.040
3	RO	BMA.005	Data dan Informasi Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan	Dokumen		-	1	1	1	1	4	-	425.579	448.560	472.783	498.313	1.845.235
KRO		7661.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria														
4	RO	AFA.001	NSPK Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan	NSPK		1	1	1	1	1	5	500.000	470.421	495.824	522.598	550.819	2.539.661
KRO		7661.CB R	Dukungan Teknis														
5	RO	CBR.001	Dokumen Dukungan Teknis Penyiapan Lahan Pembangunan Perumahan Perkotaan	Dokumen		1	-	-	-	-	1	700.000	-	-	-	-	700.000
6	RO	CBR.003	Dukungan Teknis Penyiapan Lahan dan Perizinan Perumahan Perkotaan	Dokumen		-	2	2	2	2	8	-	1.161.053	1.223.750	1.289.832	1.359.483	5.034.119
7	RO	CBR.002	Dokumen Dukungan Teknis Perijinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan	Dokumen		4	-	-	-	-	4	2.431.111	-	-	-	-	2.431.111
8	RO	CBR.004	Dukungan Teknis Penghunian Perumahan Perkotaan	Dokumen		-	3	3	3	3	12	-	1.468.150	1.547.430	1.630.991	1.719.065	6.365.636
KRO		7661.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan														
9	RO	FAE.002	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan	Laporan		3	-	-	-	-	3	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000
10	RO	FAE.006	Pemantauan dan Evaluasi Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan	Laporan		-	3	3	3	3	12	-	868.469	915.366	964.796	1.016.895	3.765.527
KEGIATAN 3: Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan (7661-Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan)																	
SASARAN KEGIATAN:																	
Meningkatnya Akses Rumah Tangga yang Terfasilitasi Pembiayaan Perumahan di Wilayah Perkotaan																	
1	Persentase Rumah Tangga yang Terfasilitasi Skema Pembiayaan Perumahan yang Terjangkau			%		100	100	100	100	100	100	8.343.538	8.313.196	8.762.109	9.235.261	9.733.966	44.388.070
PELAKSANA: Direktorat Pembiayaan Perumahan Perkotaan																	
OUTPUT KEGIATAN:																	

PROGRAM/ KEGIATAN		SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR		SATUAN	INDIKAS I LOKASI	TARGET					ANGGARAN (Rp Ribu)						
						2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
(1)		(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	KRO	7661.AB F	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana														
1	RO	ABF.003	Kebijakan Skema Bantuan Pembiayaan Perumahan, Kerja Sama dan Pembiayaan Kreatif Perumahan Perkotaan	Rekomen dasi Kebijakan		2	21	21	21	21	86	3.450.000	4.011.849	4.228.489	4.456.827	4.697.496	20.844.661
	KRO	7661.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria														
2	RO	AFA.002	NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan Perkotaan	NSPK		3	3	3	3	3	15	1.963.538	1.421.060	1.497.797	1.578.678	1.663.927	8.125.000
	KRO	7661.PE A	Koordinasi														
3	RO	PEA.001	Koordinasi Pembiayaan Perumahan Perkotaan	Kegiatan		1	-	-	-	-	1	750.000	-	-	-	-	750.000
		BA BUN	Jumlah Rumah Tangga yang Menerima Fasilitas Pembiayaan Perumahan/ Bantuan Subsidi/ Kemudahan Perumahan Perkotaan 408.475 selama 5 tahun	Keluarga		81.050	-	-	-	-	81.050						
4	RO	PEA.002	Koordinasi dan Fasilitas Pembiayaan Perumahan Perkotaan	Kegiatan		-	1	1	1	1	4	-	400.000	421.600	444.366	468.362	1.734.328
		BA BUN	Jumlah Rumah Tangga yang Menerima Fasilitas Pembiayaan Perumahan/ Bantuan Subsidi/ Kemudahan Perumahan Perkotaan 408.475 selama 5 tahun	Keluarga		-	95.800	103.200	104.650	104.825	408.475						
	KRO	7661.AE E	Kemitraan														
5	RO	AEE.001	Kegiatan KPBU dan Pembiayaan Kreatif Perumahan Perkotaan yang Siap Dikerjasamakan	Kesepak atan		1	-	-	-	-	1	500.000	-	-	-	-	500.000
6	RO	AEE.002	Kegiatan Pembiayaan Kreatif dan Kemitraan Perumahan Perkotaan	Kesepak atan		-	1	1	1	1	4	-	977.028	1.029.788	1.085.396	1.144.007	4.236.219
	KRO	7661.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan														
7	RO	FAE.003	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan	Laporan		3	3	3	3	3	15	1.680.000	1.215.857	1.281.513	1.350.715	1.423.654	6.951.739
	KRO	7661.AE F	Sosialisasi dan Diseminasi														
8	RO	AEF.001	Sosialisasi Fasilitas Pembiayaan Perumahan Perkotaan	Orang		-	100	100	100	100	400	-	287.402	302.922	319.279	336.520	1.246.123
KEGIATAN 4: Penyediaan Rumah yang Layak Huni di Perkotaan (7661-Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan)																	

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR				SATUAN	INDIKAS I LOKASI	TARGET				ANGGARAN (Rp Ribu)							
	2025	2026	2027	2028			2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL				
(1)	(2)				(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Unit Kerja Pelaksana IKK Penyediaan rumah layak huni baru dan PIC IKK hunian vertikal																		
SASARAN KEGIATAN 1:																		
Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni Baru di Perkotaan																		
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:																		
1	Persentase pelaksanaan pemrograman, penganggaran, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pembangunan Perumahan perkotaan				%		100	100	100	100	100	100	22.842.961	10.099.906	10.645.301	11.220.146	11.826.035	66.634.349
2	Persentase peningkatan ketersediaan rumah layak huni baru di wilayah perkotaan				%		100	100	100	100	100	100	-	4.144.000.000	4.088.000.000	4.282.000.000	4.476.000.000	16.990.000.000
3	Persentase penyediaan unit hunian vertikal yang terpadu di wilayah perkotaan				%		100	100	100	100	100	100	2.119.000.000	6.170.000.000	6.416.000.000	6.965.000.000	7.267.000.000	28.937.000.000
4	Persentase rumah yang mendapat bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum di perkotaan				%		100	100	100	100	100	100	-	83.000.000	87.000.000	91.000.000	96.000.000	357.000.000
5	Persentase rumah yang mendapat bantuan prasarana, sarana dan utilitas umum hunian vertikal di wilayah perkotaan				%		100	100	100	100	100	100	-	-	34.500.000	36.400.000	38.400.000	109.300.000
PELAKSANA: Direktorat Pembangunan Perumahan Perkotaan																		
OUTPUT KEGIATAN:																		
KRO	7661.AB F	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana																
1	RO	ABF.004	Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	Rekomen dari Kebijakan		5	24	24	24	24	101	9.845.269	5.184.593	5.464.561	5.759.647	6.070.668	32.324.738	
KRO	7661.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria																
2	RO	AFA.003	NSPK Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	NSPK		1	1	1	1	1	5	355.692	257.423	271.324	285.975	301.418	1.471.832	
KRO	7661.BM A	Data dan Informasi Publik																
3	RO	BMA.003	Data dan Informasi Pembangunan Perumahan Perkotaan	Dokumen		1	1	1	1	1	5	150.000	507.331	534.727	563.602	594.037	2.349.697	
KRO	7661.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan																
4	RO	FAE.004	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	Laporan		7	10	10	10	10	47	12.492.000	4.150.559	4.374.689	4.610.922	4.859.912	30.488.082	
KRO	7661.CD B	OP Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman																
5	RO	CDB.001	Pemeliharaan dan Perawatan Tower Rumah Susun Perkotaan	Unit		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
KRO	7661.CB B	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman																
6	RO	CBB.001	Rumah Susun Asrama Pendidikan Tinggi Perkotaan	Unit		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

PROGRAM/ KEGIATAN		SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	INDIKAS I LOKASI	TARGET						ANGGARAN (Rp Ribu)					
					2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
(1)		(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7	RO	CBB.002	Rumah Susun Asrama Pendidikan Keagamaan Perkotaan	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	RO	CBB.003	Rumah Susun Asrama Pendidikan Perkotaan	Unit	-	199	-	-	-	199	-	280.701.242	-	-	-	280.701.242
KRO		7661.RB B	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman													
9	RO	RBB.001	PSU Perumahan Tapak Perkotaan	Unit	-	5.708	5.708	5.708	5.708	22.832	-	83.000.000	87.000.000	91.000.000	96.000.000	357.000.000
10	RO	RBB.002	Rumah Khusus Perumahan Perkotaan	Unit	-	9.210	9.210	9.210	9.210	36.840	-	4.144.000.00 0	4.088.000.00 0	4.282.000.00 0	4.476.000.00 0	16.990.000.000
11	RO	RBB.003	Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan	Unit	100	156	-	-	-	256	1.325.683.289	92.515.738	-	-	-	1.418.199.027
12	RO	RBB.004	Rumah Susun Hunian MBR/Pekerja Perumahan Perkotaan	Unit	-	65	-	-	-	65	25.020.571	82.174.145	-	-	-	107.194.716
14	RO	RBB.006	Rumah Susun Hunian Perkotaan	Unit	-	2.789	3.380	3.510	3.510	13.189	-	5.666.710.05 7	6.416.000.00 0	6.965.000.00 0	7.267.000.00 0	26.314.710.057
15	RO	RBB.007	Rumah Susun ASN dan HANKAM (IKN) Perumahan Perkotaan	Unit	960	240	-	-	-	1.200	768.296.140	47.898.818	-	-	-	816.194.958
16	RO	RBB.009	PSU Rumah Susun Perkotaan	Unit	-	-	3.250	3.250	3.250	9.750	-	-	34.500.000	36.400.000	38.400.000	109.300.000
Unit Kerja Kontributor IKP Penanganan Kumuh																
SASARAN KEGIATAN 2:																
Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu di wilayah perkotaan																
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:																
1		Persentase luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu di perkotaan	%		100	100	100	100	100	100	-	143.140.000	145.860.000	157.420.000	159.720.000	606.140.000
PELAKSANA: Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan																
OUTPUT KEGIATAN:																
KRO		7661.RB B	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana													
1	RO	RBB.005	Penanganan Perumahan Kumuh Perkotaan	Hektar	-	68	66	68	66	268	-	143.140.000	145.860.000	157.420.000	159.720.000	606.140.000
2	RO	RBB.011	Rumah Bersantasi Layak Perkotaan	Unit	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
KEGIATAN 5: Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan (7661-Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan)																
Unit Kerja Pelaksana IKK Peningkatan kualitas rumah layak huni																

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR				SATUAN	INDIKAS I LOKASI	TARGET					ANGGARAN (Rp Ribu)						
	2025	2026	2027	2028			2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL				
(1)	(2)				(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
SASARAN KEGIATAN 1:																		
Meningkatnya Kualitas Rumah Tidak Layak Huni di Perkotaan																		
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:																		
1	Persentase pelaksanaan pemrograman, penganggaran, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Peningkatan Kualitas Perumahan perkotaan				%		100	100	100	100	100	100	25.022.073	124.160.642	130.865.317	137.932.044	145.380.374	563.360.450
2	Persentase Rumah Layak Huni yang tersedia melalui peningkatan kualitas di perkotaan				%		100	100	100	100	100	100	184.000.000	2.012.000.000	2.113.000.000	2.213.000.000	2.313.000.000	8.835.000.000
PELAKSANA: Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan																		
OUTPUT KEGIATAN:																		
KRO		7661.AB F	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana															
1	RO	ABF.005	Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	Rekomen dasi Kebijakan		6	24	24	24	24	102	7.905.000	39.142.618	41.256.319	43.484.161	45.832.305	44.030.501	
KRO		7661.BM A	Data dan Informasi Publik															
2	RO	BMA.004	Data dan Informasi Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	Layanan		7	7	7	7	7	35	2.912.073	5.507.331	5.804.727	6.118.182	6.448.564	16.220.118	
KRO		7661.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan															
3	RO	FAE.005	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan	Laporan		6	4	4	4	4	22	14.205.000	79.510.693	83.804.270	88.329.701	93.099.505	358.949.169	
KRO		7661.RB B	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman															
4	RO	RBB.008	Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perkotaan	Unit		5.412	83.125	83.125	83.125	83.125	337.912	184.000.000	2.012.000.000	2.113.000.000	2.213.000.000	2.313.000.000	8.835.000.000	
PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN																		
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS 1:																		
	Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PKP				%		84,90	86,70	88,50	90,30	91,80	91,80	630.011.795	1.784.766.205	1.887.785.345	1.996.360.699	2.122.789.197	8.421.713.241
SASARAN PROGRAM :																		
Meningkatnya Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan																		
INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM:																		
Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan							85,15	86,26	87,50	88,85	90,01	90,01	11.174.838	31.801.491	38.918.773	41.020.389	43.235.492	166.150.983
1	Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan				%		73,10	74,10	75,10	76,10	77,10	77,10						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	INDIKAS I LOKASI	TARGET						ANGGARAN (Rp Ribu)					
				2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2	Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN	%		70,07	72,38	75,03	77,35	79,83	79,83						
3	Tingkat layanan pembentukan produk hukum	%		80,40	82,10	83,40	86,40	87,20	87,20						
4	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian organisasi tata laksana	%		70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00						
5	Nilai Kinerja Anggaran	%		88,20	88,50	90,00	91,40	92,90	92,90						
6	Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI	%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
7	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Organisasi	%		92,20	92,30	92,40	92,50	92,60	92,60						
8	Tingkat Layanan Komunikasi Publik	%		85,50	86,25	87,00	87,75	88,50	88,50						
9	Tingkat Layanan Manajemen Data Unit Organisasi	%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
10	Tingkat kualitas laporan penyelenggaraan SPIP	%		92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00						
KEGIATAN:															
7676-DUKUNGAN MANAJEMEN PENYELENGGARAAN PERUMAHAN PERKOTAAN															
SASARAN KEGIATAN :															
Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan															
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN :															
Tingkat Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan		%		87,15	87,80	88,62	89,54	90,29	90,29	6.128.783	20.331.683	26.829.595	28.278.391	29.805.426	111.373.878
1	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	%		70,07	72,38	75,03	77,35	79,83	79,83						
2	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian	%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
3	Nilai kinerja anggaran Unit Kerja	%		88,20	88,50	90,00	91,40	92,90	92,90						
4	Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI	%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
5	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	%		92,20	92,30	92,40	92,50	92,60	92,60						
6	Tingkat Layanan Komunikasi Publik	%		85,50	86,25	87,00	87,75	88,50	88,50						
7	Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan	%		73,10	74,10	75,10	76,10	77,10	77,10						
8	Tingkat layanan pembentukan produk hukum	%		80,40	82,10	83,40	86,40	87,20	87,20						
9	Tingkat kualitas laporan penyelenggaraan SPIP	%		92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00						
PELAKSANA: Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan															
OUTPUT KEGIATAN:															
KRO	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal													

PROGRAM/ KEGIATAN			SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR			SATUAN	INDIKAS I LOKASI	TARGET				ANGGARAN (Rp Ribu)							
								2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
(1)			(2)			(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	1	RO	EBA.956 -	Layanan BMN	Layanan			1	20	20	20	20	81	357.000	2.840.928	2.994.338	3.156.032	3.326.458	12.674.756
	2	RO	EBA.957 -	Layanan Hukum	Layanan			3	3	3	3	3	15	1.238.512	1.695.551	1.787.111	1.883.615	1.985.330	8.590.119
	3	RO	EBA.960 -	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan			3	3	3	3	3	15	1.059.400	1.441.658	1.519.508	1.601.561	1.688.045	7.310.172
	4	RO	EBA.962 -	Layanan Umum	Layanan			1	55	55	55	55	221	333.000	5.071.497	5.345.358	5.634.007	5.938.244	22.322.106
	5	RO	EBA.994 -	Layanan Perkantoran	Layanan			1	1	1	1	1	5	1.438.126	2.068.699	2.180.409	2.298.151	2.422.251	10.407.636
	KRO		EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal															
	6	RO	EBB.951 -	Layanan Sarana Internal	Layanan			68	68	68	68	68	340	755.745	3.675.000	3.873.450	4.082.616	4.303.078	16.689.889
	KRO		EBC	Layanan Manajemen SDM Internal															
	7	RO	EBC.954 -	Layanan Manajemen SDM	Layanan			-	1	1	1	1	4	-	819.000	863.226	909.840	958.972	3,551,038
	8	RO	EBC.996 -	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	Layanan			1	1	1	1	1	5	-	1.207.500	1.272.705	1.341.431	1.413.868	5.235.504
	KRO		EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal															
	9	RO	EBD.952 -	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Layanan			1	1	1	1	1	5	150.000	225.000	237.150	249.956	263.454	1.125.560
	10	RO	EBD.953 -	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Layanan			-	1	1	1	1	4	-	120.000	126.480	133.310	140.509	520.299
11	RO	EBD.955 -	Layanan Manajemen Keuangan	Layanan			2	2	2	2	2	10	797.000	836.850	882.040	929.670	979.872	4.425.432	
12	RO	EBD.961 -	Layanan Reformasi Kinerja	Layanan			-	1	55	55	55	166	-	260.000	5.674.040	5.980.438	6.303.382	18.217.860	
13	RO	EBD.974 -	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	Layanan			-	1	1	1	1	4	-	70.000	73.780	77.764	81.963	303.507	
KEGIATAN: 7676-DUKUNGAN MANAJEMEN PENYELENGGARAAN PERUMAHAN PERKOTAAN																			
7676-DUKUNGAN MANAJEMEN PENYELENGGARAAN PERUMAHAN PERKOTAAN																			
SASARAN KEGIATAN :																			
Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan																			
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN :																			
Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan					%		88,32	88,98	89,64	90,30	90,97	90,97	1.457.521	4.703.513	4.957.503	5.225.209	5.507.370	21.851.116	
	1	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN			%		74,18	75,83	77,48	79,13	80,78	80,78							
	2	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian			%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00							
	3	Nilai kinerja anggaran Unit Kerja			%		87,00	87,50	88,00	88,50	89,00	89,00							
	4	Tingkat Layanan Manajemen Data Unit Organisasi					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00							

PROGRAM/ KEGIATAN			SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR			SATUAN	INDIKAS I LOKASI	TARGET				ANGGARAN (Rp Ribu)							
								2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
(1)			(2)			(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	5	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja				%		92,20	92,30	92,40	92,50	92,60	92,60						
	6	Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko				%		91,00	91,10	91,20	91,30	91,40	91,40						
	7	Tingkat kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran				%		75,00	78,00	81,00	84,00	87,00	87,00						
PELAKSANA: Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan																			
OUTPUT KEGIATAN:																			
	KRO		EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal															
	1	RO	EBA.962 -	Layanan Umum	Layanan			1	1	1	1	1	5	110.500	375.000	395.250	416.594	439.090	1.736.434
	2	RO	EBA.994 -	Layanan Perkantoran	Layanan			1	1	1	1	1	5	897.021	1.365.263	1.438.987	1.516.693	1.598.594	6.816.558
	3	RO	EBA.963 -	Layanan Data dan Informasi	Layanan			1	20	20	20	20	81	450.000	2.863.250	3.017.866	3.180.830	3.352.595	12.864.541
	KRO		EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal															
	4	RO	EBD.961 -	Layanan Reformasi Kinerja	Layanan			-	1	1	1	1	4	-	100.000	105.400	111.092	117.091	433.583
KEGIATAN: 7676-DUKUNGAN MANAJEMEN PENYELENGGARAAN PERUMAHAN PERKOTAAN																			
7676-DUKUNGAN MANAJEMEN PENYELENGGARAAN PERUMAHAN PERKOTAAN																			
SASARAN KEGIATAN :																			
Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan																			
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN :																			
Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan						%		88,88	89,35	89,82	90,29	90,76	90,76	885.200	1.685.144	1.776.142	1.872.054	1.973.145	8.191.685
	1	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN				%		74,18	75,83	77,48	79,13	80,78	80,78						
	2	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian				%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
	3	Nilai kinerja anggaran Unit Kerja				%		87,00	88,00	88,00	89,00	89,00	89,00						
	4	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja				%		92,20	92,30	92,40	92,50	92,60	92,60						
	5	Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko				%		91,00	91,10	91,20	91,30	91,40	91,40						
PELAKSANA: Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan																			
OUTPUT KEGIATAN:																			
	KRO		EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal															
	1	RO	EBA.962 -	Layanan Umum	Layanan			1	1	1	1	1	5	107.500	375.000	395.250	416.594	439.090	1.733.434
	2	RO	EBA.994 -	Layanan Perkantoran	Layanan			1	1	1	1	1	5	777.700	1.210.144	1.275.492	1.344.368	1.416.964	6.024.668

PROGRAM/ KEGIATAN		SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR		SATUAN	INDIKAS I LOKASI	TARGET						ANGGARAN (Rp Ribu)						
						2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	
(1)		(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	KRO	EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal															
	3	RO	EBD.961 -	Layanan Reformasi Kinerja	Layanan		-	1	1	1	1	4	-	100.000	105.400	111.092	117.091	433.583
KEGIATAN: 7676-DUKUNGAN MANAJEMEN PENYELENGGARAAN PERUMAHAN PERKOTAAN																		
SASARAN KEGIATAN :																		
Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Direktorat Pembiayaan Perumahan Perkotaan																		
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN :																		
Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Pembiayaan Perumahan Perkotaan				%		88,88	89,35	89,82	90,29	90,76	90,76	877.521	1.671.911	1.762.194	1.857.354	1.957.651	8.126.631	
	1	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN		%		74,18	75,83	77,48	79,13	80,78	80,78							
	2	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian		%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00							
	3	Nilai kinerja anggaran Unit Kerja		%		87,00	87,50	88,00	88,50	89,00	89,00							
	4	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja		%		92,00	92,30	92,40	92,50	92,60	92,60							
	5	Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko		%		91,00	91,10	91,20	91,30	91,40	91,40							
PELAKSANA: Direktorat Pembiayaan Perumahan Perkotaan																		
OUTPUT KEGIATAN:																		
	KRO	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal															
	1	RO	EBA.962 -	Layanan Umum	Layanan		1	1	1	1	1	5	110.000	375.000	395.250	416.594	439.090	1.735.934
	2	RO	EBA.994 -	Layanan Perkantoran	Layanan		1	1	1	1	1	5	767.521	1.196.911	1.261.544	1.329.668	1.401.470	5.957.114
	KRO	EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal															
	3	RO	EBD.961 -	Layanan Reformasi Kinerja	Layanan		-	1	1	1	1	4	-	100.000	105.400	111.092	117.091	433.583
KEGIATAN: 7676-DUKUNGAN MANAJEMEN PENYELENGGARAAN PERUMAHAN PERKOTAAN																		
SASARAN KEGIATAN :																		
Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Direktorat Pembangunan Perumahan Perkotaan																		
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN :																		
Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Pembangunan Perumahan Perkotaan				%		88,88	89,35	89,82	90,29	90,76	90,76	919.150	1.711.144	1.803.546	1.900.938	2.003.589	8.338.367	
	1	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN		%		74,18	75,83	77,48	79,13	80,78	80,78							

PROGRAM/ KEGIATAN			SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR		SATUAN	INDIKAS I LOKASI	TARGET					ANGGARAN (Rp Ribu)						
							2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
(1)			(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	2	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian			%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
	3	Nilai kinerja anggaran Unit Kerja			%		87,00	87,50	88,00	88,50	89,00	89,00						
	4	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja			%		92,00	92,30	92,40	92,50	92,60	92,60						
	5	Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko			%		91,00	91,10	91,20	91,30	91,40	91,40						
PELAKSANA: Pembangunan Perumahan Perkotaan																		
OUTPUT KEGIATAN:																		
	KRO	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal															
		RO	EBA.962 -	Layanan Umum	Layanan		1	1	1	1	1	5	121.450	375.000	395.250	416.594	439.090	1.747.384
		RO	EBA.994 -	Layanan Perkantoran	Layanan		1	1	1	1	1	5	797.700	1.236.144	1.302.896	1.373.252	1.447.408	6.157.400
	KRO	EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal															
	3	RO	EBD.961 -	Layanan Reformasi Kinerja	Layanan		-	1	1	1	1	4	-	100.000	105.400	111.092	117.091	433.583
KEGIATAN: 7676-DUKUNGAN MANAJEMEN PENYELENGGARAAN PERUMAHAN PERKOTAAN																		
SASARAN KEGIATAN :																		
Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan																		
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN :																		
Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan					%		88,88	89,35	89,82	90,29	90,76	90,76	906.663	1.698.096	1.789.793	1.886.443	1.988.311	8.269.306
	1	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN			%		74,18	75,83	77,48	79,13	80,78	80,78						
	2	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian			%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
	3	Nilai kinerja anggaran Unit Kerja			%		87,00	87,50	88,00	88,50	89,00	89,00						
	4	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja			%		92,00	92,30	92,40	92,50	92,60	92,60						
	5	Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko			%		91,00	91,10	91,20	91,30	91,40	91,40						
PELAKSANA: Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan																		
OUTPUT KEGIATAN:																		
	KRO	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal															
	1	RO	EBA.962 -	Layanan Umum	Layanan		1	1	1	1	1	5	119.000	375.000	395.250	416.594	439.090	1.744.934
	2	RO	EBA.994 -	Layanan Perkantoran	Layanan		1	1	1	1	1	5	787.663	1.223.096	1.289.143	1.358.757	1.432.130	6.090.789

PROGRAM/ KEGIATAN			SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR		SATUAN	INDIKAS I LOKASI	TARGET						ANGGARAN (Rp Ribu)					
							2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
(1)			(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	KRO		EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal														
3	RO		EBD.961 -	Layanan Reformasi Kinerja	Layanan		-	1	1	1	1	4	-	100.000	105.400	111.092	117.091	433.583

LAMPIRAN II. SURAT PENGESAHAN DIPA



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 146.05.1.694311/2026**



DS:5078-2080-0940-9146

A. Dasar Hukum:

- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- | | | | |
|-------------------------------|---|-----------------------|---|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : | (146) | KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 2. Unit Organisasi | : | (05) | DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN |
| 3. Provinsi | : | (01) | DKI JAKARTA |
| 4. Kode>Nama Satker | : | (694311) | DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN |
| Sebesar | : | Rp. 2.838.817.512.000 | (DUA TRILIUN DELAPAN RATUS TIGA PULUH DELAPAN MILIAR DELAPAN RATUS TUJUH BELAS JUTA LIMA RATUS DUA BELAS RIBU RUPIAH) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Terlampir

Terlampir

Jumlah Uang

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	2.838.817.512.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNB TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- | | | |
|-------------------|-----------|-------------------|
| 1. KPPN JAKARTA V | (139) Rp. | 2.838.817.512.000 |
|-------------------|-----------|-------------------|

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISI PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 146.05.1.694311/2026



DS:5078-2080-0940-9146

Satker : (694311) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN

06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	Rp.	2.838.817.512.000
06.01	PEMBANGUNAN PERUMAHAN	Rp.	2.828.657.285.000
06.90	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA	Rp.	10.160.227.000

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 146.05.1.694311/2026



DS:5078-2080-0940-9146

Satker : (694311) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN

IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.	2.828.657.285.000
IA.7661	Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Rp.	2.828.657.285.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	10.160.227.000
WA.7676	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Rp.	10.160.227.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 146.05.1.694311/2026
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:5078-2080-0940-9146

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (694311) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN

Halaman : I A. 1

Program	:	146.05.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman			2.828.657.285.000
Kegiatan	:	7661	Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan			2.828.657.285.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:					
Klasifikasi Rincian Output	1	:	7661.ABF Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	26,00	Rekomendasi Kebijakan	6.820.324.000
Rincian Output	:	01	ABF.001 Kebijakan, Kemitraan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	6,00	Rekomendasi Kebijakan	1.575.816.000
		02	ABF.002 Kebijakan Penyelenggaraan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan	5,00	Rekomendasi Kebijakan	887.175.000
		03	ABF.003 Kebijakan Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan	3,00	Rekomendasi Kebijakan	1.849.982.000
		04	ABF.004 Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	6,00	Rekomendasi Kebijakan	1.682.358.000
		05	ABF.005 Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	6,00	Rekomendasi Kebijakan	824.993.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	7661.AEA Koordinasi	1,00	kegiatan	230.491.000
Rincian Output	:	01	AEA.001 Koordinasi Pembiayaan Perumahan Perkotaan	1,00	kegiatan	230.491.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	7661.AEE Kemitraan	1,00	Kesepakatan	422.168.000
Rincian Output	:	01	AEE.001 Kegiatan KPBU dan Pembiayaan Kreatif Perumahan Perkotaan yang Siap Dikerjasamakan	1,00	Kesepakatan	422.168.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	7661.AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	5,00	NSPK	694.551.000
Rincian Output	:	01	AFA.001 NSPK Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan	1,00	NSPK	184.657.000
		02	AFA.002 NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan Perkotaan	3,00	NSPK	396.295.000
		03	AFA.003 NSPK Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	1,00	NSPK	113.599.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 146.05.1.694311/2026
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:5078-2080-0940-9146

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (694311) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN

Halaman : I A. 2

Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria				NSPK				
Klasifikasi Rincian Output	5	:	7661.BMA	Data dan Informasi Publik	10,00	dokumen, Peta, Data	1.733.512.000	
Rincian Output		:	01	BMA.001	Data dan Informasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1,00	dokumen	252.412.000
			02	BMA.002	Data dan Informasi Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan	1,00	dokumen	172.349.000
			03	BMA.003	Data dan Informasi Pembangunan Perumahan Perkotaan	1,00	dokumen	91.502.000
			04	BMA.004	Data dan Informasi Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	7,00	dokumen	1.217.249.000
Klasifikasi Rincian Output	6	:	7661.CBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman	63,00	unit, Hektar	36.000.000.000	
Rincian Output		:	01	CBB.002	Rumah Susun Asrama Pendidikan Keagamaan Perkotaan	63,00	unit	36.000.000.000
Klasifikasi Rincian Output	7	:	7661.CBR	Dukungan Teknis	5,00	Dokumen	1.441.304.000	
Rincian Output		:	01	CBR.001	Dukungan Teknis Penyiapan Lahan dan Perizinan Perumahan Perkotaan	1,00	Dokumen	568.277.000
			02	CBR.002	Dukungan Teknis Penghunian Perumahan Perkotaan	4,00	Dokumen	873.027.000
Klasifikasi Rincian Output	8	:	7661.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	21,00	Laporan, Layanan	4.688.883.000	
Rincian Output		:	01	FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	2,00	Laporan	534.848.000
			02	FAE.002	Pemantauan dan Evaluasi Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan	3,00	Laporan	415.575.000
			03	FAE.003	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan	4,00	Laporan	560.073.000
			04	FAE.004	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	7,00	Laporan	2.081.015.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 146.05.1.694311/2026
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:5078-2080-0940-9146

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (694311) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN

Halaman : I A. 3

Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan				Laporan, Layanan		
	05	F AE.005	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	5.00	Laporan	1.097.372.000
Klasifikasi Rincian Output	9	:	7661.FAN Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden	1,00	Paket	167.245.712.000
Rincian Output	:	01	FAN.ZZ1 Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden	1,00	Paket	167.245.712.000
Klasifikasi Rincian Output	10	:	7661.RBB Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman	121.675,00	unit, Hektar	2.609.380.340.000
Rincian Output	:	01	RBB.001 PSU Perumahan Tapak Perkotaan (PN)	600,00	unit	7.824.600.000
		02	RBB.008 Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perkotaan (PN)	120000,00	unit	2.542.800.000.000
		03	RBB.009 PSU Rumah Susun Perkotaan (PN)	75,00	unit	46.755.740.000
		04	RBB.010 Stimulan Pembangunan Rumah Swadaya di Perkotaan (PN)	1000,00	unit	12.000.000.000
Program	:	146.05.WA	Program Dukungan Manajemen			10.160.227.000
Kegiatan	:	7676	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan			10.160.227.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:					
Klasifikasi Rincian Output	1	:	7676.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	19,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	9.144.100.000
Rincian Output	:	01	EBA.956 Layanan BMN dan Manajemen Keuangan	1,00	Layanan	244.241.000
		02	EBA.957 Layanan Hukum dan Kerjasama	3,00	Layanan	384.209.000
		03	EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	2,00	Layanan	174.347.000
		04	EBA.962 Layanan Umum	6,00	Layanan	258.874.000
		05	EBA.963 Layanan Data dan Informasi	1,00	Layanan	313.726.000
		06	EBA.994 Layanan Perkantoran	6,00	Layanan	7.768.703.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 146.05.1.694311/2026
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:5078-2080-0940-9146

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (694311) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN

Halaman : I A. 4

Klasifikasi Rincian Output	2	:	7676.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	68,00	Unit, m2, Paket	454.977.000
Rincian Output	:	01	EBB.951	Layanan Sarana Internal	68.00	Unit	454.977.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	7676.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	2,00	Orang, Layanan, Rekomendasi	89.716.000
Rincian Output	:	01	EBC.954	Layanan Manajemen SDM	1.00	Layanan	45.211.000
		02	EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	1.00	Layanan	44.505.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	7676.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	5,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	471.434.000
Rincian Output	:	01	EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	1.00	Layanan	154.061.000
		02	EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	1.00	Dokumen	142.760.000
		03	EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1.00	Dokumen	41.599.000
		04	EBD.Z23	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1.00	Layanan	59.905.000
		05	EBD.Z24	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1.00	Layanan	73.109.000

Jakarta, 01 Desember 2025

A.N. MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN

ttd.

SRI HARYATI
197107071997032004

LAMPIRAN III. LEMBAR PERJANJIAN KINERJA



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Sri Haryati**
Jabatan : Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Maruarar Sirait**
Jabatan : Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2026

Pihak Kedua

Pihak Pertama

MARUARAR SIRAIT

SRI HARYATI

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
1	Meningkatkan Hunia Layak dan Terjangkau di Wilayah Perkotaan	1 Persentase Hunian Layak dan Terjangkau di Wilayah Perkotaan	100%
		2 Persentase Peningkatan Penanganan Permukiman Kumuh di Wilayah Perkotaan	100%
		3 Persentase Desa yang memiliki 100% rumah layak huni di wilayah perkotaan	100%
2	Meningkatkan Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	1 Tingkat kualitas dukungan manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	86,26 %

PROGRAM

- 1 Perumahan dan Kawasan Permukiman
- 2 Dukungan Manajemen

PAGU APBN

Rp 3.061.385.645.000,00
Rp 12.543.534.000,00
Rp 3.073.929.179.000,00

Jakarta, Maret 2026

**MENTERI
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN

MARUARAR SIRAIT

SRI HARYATI